

PEREMPUAN DAN PKK: SUATU KAJIAN ETNOGRAFI
PEREMPUAN DI ORGANISASI PKK
(Di Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran)

Skripsi

Oleh

IRMA YULIA
NPM 1816011007



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG

2022

ABSTRAK

PEREMPUAN DAN PKK: SUATU KAJIAN ETNOGRAFI

PEREMPUAN DI ORGANISASI PKK

(Di Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran)

**Oleh
IRMA YULIA**

Penelitian ini hendak mengkaji tentang perempuan, khususnya perempuan yang tergabung dalam organisasi PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode etnografi. Informan dalam penelitian ini yaitu selaku pengurus PKK dan kader PKK yang aktif dalam organisasi PKK Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seorang kader PKK memiliki makna diri positif terhadap dirinya maupun terhadap dunianya, sehingga para perempuan yang telah menjadi kader PKK, mempunyai kesadaran diri bahwa menjadi kader PKK yang telah dipercaya oleh masyarakat memiliki tanggung jawab yang lebih, dan harus menjaga sikap serta penampilannya. Teori utama yang dipakai pada penelitian ini, yaitu teori identitas sosial dan teori interaksionisme simbolik, membuktikan bahwa sebuah identitas sosial akan atribut yang dimiliki oleh seorang individu dimana individu tersebut merupakan bagian dari suatu kelompok sosial, atribut tersebut kemudian digunakan untuk memperkenalkan adanya kelompok sosialnya dan membedakan kelompok sosialnya tersebut dengan kelompok sosial lain. Pembentukan identitas atas peran perempuan di dalam organisasi PKK pada dasarnya tidak terlepas dari proses komunikasi yang terjadi di PKK. Sehingga, adanya konstruksi identitas di dalam PKK lebih lanjut berkenaan dengan bagaimana proses produksi dan penerimaan pesan berlangsung di dalam Organisasi PKK, terkait sejauh mana para kader PKK mampu berkontribusi dalamnya.

Kata Kunci: PKK, organisasi, teori identitas sosial, teori interaksionisme simbolik

ABSTRACT

WOMEN AND PKK: AN ETHNOGRAPHIC STUDY WOMEN IN PKK ORGANIZATIONS (In Hanura Village, Teluk Pandan District, Pesawaran Regency)

By

IRMA YULIA

This study aims to examine women, especially women who are members of the PKK (Family Welfare Empowerment) organization. This study uses qualitative research methods with ethnographic methods. The informants in this study were PKK administrators and PKK cadres who were active in the PKK organization in Hanura Village, Teluk Pandan District, Pesawaran Regency. Data collection techniques used, namely observation, in-depth interviews and documentation. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation and data verification and conclusions. The results of this study indicate that a PKK cadre has a positive self-meaning towards himself and his world, so that women who have become PKK cadres, have self-awareness that being a PKK cadre who has been trusted by the community has more responsibility, and must maintain an attitude and attitude. his appearance. The main theories used in this research, namely the theory of social identity and the theory of symbolic interactionism, prove that a social identity will be the attributes possessed by an individual where the individual is part of a social group, these attributes are then used to introduce the existence of a social group and distinguish social group with other social groups. The formation of identity for the role of women in the PKK organization is basically inseparable from the communication process that occurs in the PKK. Thus, the existence of identity construction within the PKK is further related to how the process of producing and receiving messages takes place within the PKK Organization, regarding the extent to which PKK cadres are able to contribute to it.

Keywords: Conflict, empowerment, women farmer group, forest farmer group

PEREMPUAN DAN PKK: SUATU KAJIAN ETNOGRAFI
PEREMPUAN DI ORGANISASI PKK
(Di Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran)

Oleh
IRMA YULIA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI

Pada
Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

Judul Skripsi : **PEREMPUAN DAN PKK: SUATU KAJIAN
ETNOGRAFI PEREMPUAN DI ORGANISASI
PKK (Di Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan,
Kabupaten Pesawaran)**

Nama Mahasiswa : **Irma Yulia**

NPM : **1816011007**

Program Studi : **Sosiologi**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



2. Ketua Jurusan Sosiologi

[Handwritten Signature]

Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.
NIP 19770401 200501 2 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M. Si.**



.....

Penguji Utama : **Dra. Yuni Ratnasari, M.Si.**



.....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP.19610807 198703 2 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **14 April 2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 14 April 2022

Yang membuat pernyataan,



Irma Yulia

1816011007

RIWAYAT HIDUP



Irma Yulia, dilahirkan di Desa Sidokerto, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 24 Juli 2000. Anak pertama dari pasangan Bapak Sukino dan Ibu Windaryati. Penulis memiliki adik laki-laki yang bernama Dian Prasetia.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh antara lain:

1. TK Pancasila Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2005 dan lulus di tahun 2006
2. SD Negeri 1 Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2006 dan lulus di tahun 2012
3. SMP Pancasila Sidokerto pada tahun 2012 dan lulus di tahun 2015
4. SMA Negeri 1 Trimurjo pada tahun 2015 dan lulus di tahun 2018

Tahun 2018 diterima sebagai mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN dan mengikuti organisasi di antaranya FSPI, DPM U KBM UNILA dan Himpunan Mahasiswa Jurusan Sosiologi. Pada tahun 2021, penulis telah melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) mandiri daring putra daerah di Desa Sidokerto, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah.

MOTTO

“Dan Allah adalah sebaik-baiknya Sandaran”

(QS. Ali’Imron: 163)

**“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya untuk
menemukanmu”**

(Ali bin Abi Thalib)

“Tantangan terbesar dalam hidup ini adalah diri kita sendiri”

(Irma Yulia)

**“Jangan pernah menyesal karena tidak menang dalam perjuangan, tetapi
menyesal karena tidak pernah berjuang”**

(Irma Yulia)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT,
skripsi ini Saya persembahkan kepada:

Bapak dan Ibuku Tercinta
Bapak Sukino dan Ibu Windaryati

Adikku Tersayang
Dian Prasetia

Kedua Sahabatku
Anggi Reza Khasanah dan Nurlela

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahas
Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si. dan Ibu Dra. Yuni Ratnasari, M.Si.
Seluruh dosen Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Kawan-kawan seperjuanganku

Sosiologi 2018

SANWANCANA

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya. Tiada daya dan upaya serta kekuatan yang dimiliki untuk dapat menyelesaikan skripsi ini selain atas limpahan karunia dan anugerah-Nya. Terima kasih Allah atas segala pertolongan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul “Perempuan dan PKK: Suatu Kajian Etnografi Perempuan di Organisasi PKK (Di Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran)”.

Penelitian skripsi ini tidak terlepas dari hidayah, karunia, bantuan, dukungan, doa, kritik dan saran serta bimbingan yang berasal dari berbagai pihak. Maka dari itu, melalui karya ini akan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
2. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si. selaku Ketua Jurusan Sosiologi sekaligus Dosen Pemimbing Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Terima kasih banyak bu telah memberikan bimbingan, waktu, tenaga, kritik, saran, motivasi serta arahan selama penulisan skripsi ini. Maafkan saya Ibu yang terlalu banyak kekurangan, dan telah merepotkan selama proses mengerjakan skripsi. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan keberkahan kepada Ibu dan Keluarga.

3. Ibu Dra Yuni Ratnasari, M.Si. selaku Dosen Pembahas yang juga telah membantu saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih ibu telah

memberikan kritik, saran, motivasi, serta arahan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga ibu dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan limpahan rahmat oleh Allah SWT.

4. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terima kasih bapak ibu dosen atas segala ilmu, pengalaman, serta motivasinya. Semoga Allah selalu memberikan kelimpahan kebahagiaan serta kesehatan yang tiada batas.
5. Kepada Alm. Ibu Endry Fatimaningsih, M.Si. Terima kasih bu atas segala kebaikan pada saat mahasiswa baru, sudah diberikan motivasi serta arahan, terima kasih ibu sudah diberikan pengalaman dan kesempatan untuk dekat dengan ibu. Semoga Allah menempatkan ibu di surga-Nya, dan semoga keluarga selalu diberikan kesehatan dan limpahan kebahagiaan.
6. Seluruh staf Administrasi dan Karyawan Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu dengan sangat baik dalam melayani urusan administrasi perkuliahan maupun syarat menuju wisuda.
7. Untuk kedua orang tuaku tersayang, bapak Sukino dan Ibu Windaryati, bapak ibu terima kasih banyak atas segala cinta, kasih sayang, doa, dukungan, kerja keras, pengorbanan serta kesempatan bahwa putri bapak dan ibu berhasil menyelesaikan dan mendapatkan gelar sarjana. Semoga bapak ibu selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberikan kesehatan agar selalu dapat mendoakan Irma dan Dian, sebab tanpa doa dan kasih sayang kalian kami tidak akan menjadi apa-apa.
8. Untuk adikku tersayang Dian Prasetya, terima kasih telah banyak memberikan hiburan dikala penat, tetaplah baik dalam menjadi partner untuk membahagiakan bapak ibu ya dek.
9. Kedua sahabat saya sejak SMA yaitu blau (Anggi Reza Khasanah) dan brud (Nurlela). Terima kasih telah menjadi partner yang sangat lengkap sejak SMA hingga masa kuliah, terima kasih karena selalu membersamai setiap proses perjuangan untuk menyelesaikan setiap tantangan kehidupan, terima kasih sudah banyak mendukung selama proses perkuliahan hingga sampai proses wisuda, terima kasih atas kasih sayang serta doa kalian sehingga bisa menghantarkan sampai proses ini. Semoga kita selalu menjadi sahabat baik di

- dunia maupun di surga, aamiin. Sehat selalu kalian, bismillah sukses bareng.
10. Keempat sahabat saya Jessica Vanelia Amanda, Tita Aulia Azhari, Arifah Amalia Kautsari, Annisa Merina Rusman yang dipertemukan di perantauan semasa kuliah di Universitas Lampung. Terima kasih telah mau mendengarkan keluh kesah bahkan tangisan saya.
 11. Kepada keluarga ETOS ID LAMPUNG sejak tahun 2019. Terima kasih ETOS ID, karena banyak mahasiswa yang tetap melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi melalui program ini. Dan untuk keluarga ETOS ID LAMPUNG, terutama fasilitator yaitu mba endah, kak dani, dan kak pujo, terima kasih telah membimbing saya selama menjadi penerima manfaat. Dan untuk teman-teman seperjuanganku di etos yaitu Mirda, Mba Nov, bu Ayu, Nurin, Sely, mba Armi, Mumuf, Uwi, Nining, Fai, Rican, Amiza, Soni, Khozin, Dendi, Hilmi, Rendy, Sahrul, Wahyudi.
 12. Kepada Sela, Dina, May, Cindi, Fiken, Nadia, Juleha, Irma Fitriyana, Nadya, Nuri, Eki, Heri, Farhan, Arya, terima kasih atas segala kebaikan kalian semasa di proses perkuliahan sejak mahasiswa baru.
 13. Terima kasih partner KKN 40 hari, Ana, Ani, Andika, Yuda.
 14. Terima kasih keluarga pimpinan FSPI FISIP pada tahun 2020 yaitu Helmi, Harido, Fahrezi, Anjas, Panji, Berta, Heri, Wahyu, Amin, Hizbul, Risdan, Salsa, Ega, Ana, Ani, Dinda, Kak Ica, Diah, Urba, Rika, Arda, Izza.
 15. Keluarga besar Balai Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri di Lampung, terima kasih atas ilmu dan pengalamannya.
 16. Kepada Bapak Kepala Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran yaitu Bapak Rio Remota, S.P. dan Ibu Dwi Senja Septiana Sari, S.H. serta Ibu Kader TP-PKK yang memberikan izin dan dukungan atas kemudahan penyusunan skripsi saya

Bandar Lampung, 14 April 2022

Irma Yulia

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusah Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Tentang Perempuan	9
2.2 Tinjauan Tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).....	10
2.2.1 Sejarah PKK.....	10
2.2.2 Visi dan Misi Gerakan PKK.....	13
2.2.3 Tugas Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).....	14
2.2.4 Fungsi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	14
2.2.5 Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).....	15
2.2.6 Tugas Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Desa.....	15
2.3 Tinjauan Tentang Gender dan Organisasi.....	17
2.4 Tinjauan Tentang Pemberdayaan.....	22
2.4.1 Prinsip Pemberdayaan	25
2.4.2 Tujuan Pemberdayaan	27
2.4.3 Tahapan Pemberdayaan.....	28

2.4.4	Strategi Pemberdayaan	29
2.5	Tinjauan Tentang Makna	30
2.5.1	Tipe-tipe Makna	31
2.6	Tinjauan Tentang Motivasi Organisasi	32
2.7	Teori Identitas Sosial (Henry Tajfel)	36
2.8	Teori Interaksionisme Simbolik.....	38
2.9	Penelitian Terdahulu	40

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1	Tipe Penelitian	46
3.2	Penentuan Informan	47
3.3	Lokasi Penelitian.....	47
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.4.1	Observasi.....	48
3.4.2	Wawancara Mendalam	48
3.4.3	Dokumentasi.....	48
3.5	Jenis dan Sumber Data.....	49
3.5.1	Data Primer	49
3.5.2	Data Sekunder	49
3.6	Teknik Analisis Data.....	50
3.6.1	Reduksi Data	50
3.6.2	Penyajian Data.....	50
3.6.3	Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan.....	51

BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1	Gambaran Umum Desa Hanura	52
4.1.1	Sejarah Desa Trans-AD Hanura.....	52
4.1.2	Struktur dan Organisasi Desa Hanura	57
4.2	Kondisi Geografis Desa Hanura	61
4.2.1	Batas-batas Desa	61
4.2.2	Orbitasi	61
4.2.3	Topografi.....	61
4.2.4	Luas Wilayah Desa Hanura Menurut Fungsinya	62
4.2.5	Peta Persebaran Penduduk Desa Hanura.....	62

4.3 Keadaan Penduduk Desa Hanura.....	63
4.3.1 Jumlah Penduduk	63
4.3.2 Status Sosial Ekonomi Masyarakat	64
4.3.3 Penduduk Berdasarkan Kepercayaan	65
4.3.4 Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan	66
4.3.5 Sarana dan Prasarana Desa Hanura.....	67

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian	68
5.1.1 Profil Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	68
5.1.2 Profil Informan.....	69
5.1.3 Program Kerja PKK Desa Hanura	71
5.1.4 Pemahaman Perempuan Mengenai Makna Dirinya dan Dunianya di Organisasi PKK.....	74
5.1.5 Strategi Kader PKK Dalam Mencapai Program Kerja PKK.....	84
5.1.6 Program Unggulan Yang Dijadikan Sebagai Prioritas Dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	95
5.1.7 Hasil Pemberdayaan Yang Diterapkan PKK Di Desa Hanura.....	97
5.2 Pembahasan.....	101

BAB VI. PENUTUP

6.1 Kesimpulan	116
6.2 Saran	118

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Struktur Kepemerintahan Desa Hanura	60
2. Luas Wilayah Desa Hanura	62
3. Jumlah Penduduk Desa Hanura	63
4. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Hanura	64
5. Agama Penduduk Desa Hanura	65
6. Tempat Ibadah	65
7. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Hanura.....	66
8. Sarana Pendidikan Desa Hanura	66
9. Infrastruktur Desa Hanura	67
10. Struktur Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di Desa Hanura.....	69
11. Profil Informan.....	70
12. Program Kerja PKK.....	71
13. Hasil Pelaksanaan Program Kerja PKK.....	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Peta Persebaran Penduduk Desa Hanura.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Pedoman wawancara
2. Dokumentasi Kegiatan PKK Desa Hanura

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan melakukan kajian mengenai perempuan, khususnya perempuan yang tergabung dalam organisasi PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga). Perempuan yang tergabung di Organisasi PKK, merupakan perempuan terpilih. Sebab, di Organisasi PKK didasari dengan sifat sukarela. Sifat sukarela disini ditandai dengan tidak adanya gaji atau insentif untuk para kader PKK, tetapi lebih kepada kebijakan jika sudah mendekati hari raya para kader mendapatkan sebuah tunjangan hari raya (THR). Perempuan yang tergabung dalam Organisasi PKK di Desa Hanura juga demikian, mereka tidak mendapatkan gaji atau insentif rutin, bahkan tidak jarang jika ada kegiatan mereka mengadakan iuran dengan tujuan agar kegiatan PKK dapat berjalan dengan lancar. Padahal jika dilihat dari perannya, mereka sangat padat aktivitas dan kegiatannya untuk melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat, sasaran masyarakat yang akan dilakukan pemberdayaan juga cukup luas. Sebagaimana tertuang pada pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 yakni sasaran pemberdayaan masyarakat melalui gerakan organisasi PKK adalah keluarga diperdasaan yang kemudian perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan dalam mental, spritual, fisik dan material.

Kader PKK memiliki tugas yang sangat luar biasa banyak, padahal para kader selain menjadi kader PKK juga menjadi Ibu Rumah Tangga. Hal tersebut jika menggunakan perhitungan rasional, maka tidak akan ada PKK, dan juga tidak akan ada seorang kader yang akan melaksanakan sebuah pemberdayaan. Padahal, Organisasi PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) adalah sebuah

organisasi yang telah berdiri sejak tahun 1957. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan salah satu organisasi yang ada di kelurahan dengan tujuan untuk memberdayakan perempuan, sebuah gerakan yang tumbuh dari bawah dan perempuan sebagai penggerak serta dimanisatornya dalam membangun dan membina sehingga diharapkan dapat membentuk keluarga yang berkualitas agar terwujud kesejahteraan keluarga sebagai unit kelompok terkecil dalam masyarakat. Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama pemberdayaan, hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil di masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kemajuan bangsa, kemajuan pembangunan, sebab kesejahteraan keluarga menjadi salah satu barometer atau tolak ukur dalam pembangunan. Sehingga keberadaan PKK harus dapat dijaga atau bahkan lebih ditingkatkan kembali, agar PKK tetap bisa mempunyai kader yang akan melaksanakan pemberdayaan untuk masyarakat luas dan mewujudkan sebuah keberhasilan pembangunan.

Kaum perempuan adalah salah satu penentu keberhasilan pembangunan sebuah bangsa. Perempuan memiliki keterlibatan yang besar untuk membentuk sebuah keluarga yang bermartabat. Lebih dari itu, dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan, perempuan juga memiliki peran strategisnya melalui pemberdayaan masyarakat. Diantara bukti konkritnya yaitu perempuan mampu melakukan dan meningkatkan usaha produktif dalam rumah tangganya, sehingga tercipta suatu kesejahteraan di dalam keluarga (Soedarsono dan Murniatmo 1986).

Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak upaya untuk melakukan pemberdayaan perempuan. Oleh sebab hal tersebut, berbagai organisasi perempuan dibentuk oleh pemerintah guna mendukung program peningkatan peranan perempuan Indonesia dalam bidang pembangunan, yang terkategori secara garis besar sebagai berikut:

1. Dharma Perempuan, yaitu kelompok para istri Pegawai Negeri,
2. Dharma Pertiwi, yaitu kelompok para istri anggota ABRI, dan
3. Organisasi PKK, yaitu organisasi yang terdiri dari para ibu rumah tangga di daerah pedesaan dan di kota yang bukan istri pegawai negeri/istri ABRI,

diciptakan yang secara jelas dinyatakan oleh GBHN 1983 sebagai salah satu organisasi perempuan yang berfungsi memberi dorongan partisipasi perempuan Indonesia pada proses pembangunan (Nursyahbani Katjasungkana 1989:41, dalam Soetrisno 1997:68).

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Bab 1 Pasal 1 Ayat 5 yang berbunyi : “Gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, selanjutnya disebut dengan gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan”.

Berdasarkan peraturan Pasal 1 Ayat 5 tersebut dapat diketahui bahwa PKK bertugas melaksanakan pemberdayaan terhadap masyarakat terutama perempuan. Sebab, PKK merupakan salah satu wadah organisasi perempuan di desa yaitu tugasnya berupa mendorong gerakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta berperan dalam kegiatan pertumbuhan desa. Keterlibatan perempuan dalam menyejahterakan kehidupan keluarga adalah salah satu peran terbesar dan strategis. Sebab, perempuan juga memiliki peran sebagai subjek pembangunan. “Perempuan sebagai sumber daya manusia dalam pembangunan memiliki peran penting untuk membangun bangsa dan negaranya karena perempuan adalah motor penggerak dari pembangunan itu sendiri” (www.kompasiana.com). Oleh sebab itu, diperlukan adanya pembinaan perempuan agar para perempuan tersebut mampu melaksanakan dengan baik peran gandanya.

Aritonang (2000:142-143) mengemukakan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan upaya meningkatkan kemampuan perempuan untuk mengembangkan keterampilan serta kapasitasnya dalam meraih akses dan penguasaan seperti: pengambilan keputusan, sumber-sumber, dan jalur atau struktur yang menunjang.

Pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan informasi berkaitan dengan pentingnya kehadiran perempuan di tengah masyarakat, sehingga perempuan memiliki motivasi, keterampilan dan rasa percaya diri untuk mengambil keputusan, menyatakan jati dirinya serta berperan penting untuk keluarga serta masyarakat.

PKK dapat menjadi patokan bahwa perempuan telah mampu memberdayakan dirinya sendiri dapat dilihat dari keanggotaan PKK yang didominasi oleh perempuan terutama ibu-ibu. Keberhasilan dan keberlanjutan tersebut dapat tercapai apabila perempuan mampu mengadakan berbagai kegiatan sebagai upaya membantu perempuan lain supaya bisa berdaya seperti mereka. Kegiatan tersebut dapat berbentuk program kerja PKK yang harus senantiasa berorientasi pada program dan kegiatan praktis. PKK sudah seharusnya selalu bergerak dan melaksanakan berbagai aksi yang nyata, terkhusus pada pemberdayaan kaum perempuan, senantiasa aktif berperan menyukseskan berbagai program pembangunan di masing-masing daerahnya.

PKK di Desa Hanura tergolong memiliki kualitas yang baik dalam hal pemberdayaan perempuan. Hal tersebut dibuktikan dengan Desa Hanura Kabupaten Pesawaran berhasil meraih juara 1 Lomba Desa Tingkat Regional I Wilayah Sumatera pada tahun 2016 (Lampung Media Online, 2016). Lomba Desa merupakan *event* yang berfungsi untuk mengenali, mengoptimalkan dan mengevaluasi potensi desa yang ada, serta serangkaian usaha dan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh desa atas dasar kekuatan dan tekad sendiri. Sehingga menjadi cerminan bahwa kerjasama, kekompakan, keaktifan, serta kekuatan desa mulai dari kepemimpinan serta organisasi yang ada di desa dapat di golongankan sudah cukup baik.

PKK di Desa Hanura memiliki beberapa kegiatan yang dilakukan sebagai upaya pengoptimalan pendapatan keluarga melalui kemampuan perempuan. Dalam bidang keterampilan PKK melakukan kegiatan pelatihan kerajinan tangan (vas bunga, tempat tisu, tas, strep masker, dompet, serta tapis). Salah satu bahan yang

digunakan untuk membuat kerajinan tangan adalah dengan memanfaatkan dan mendaur ulang barang bekas sehingga bernilai ekonomi yang bisa memberikan tambahan pendapatan keluarga. Di samping itu PKK juga melakukan pelatihan atau demo memasak yang dihadiri perempuan Desa Hanura, setelah pelatihan yang dilakukan tersebut para perempuan di Desa Hanura mulai mempraktikkan di masing-masing rumahnya, selain itu sudah ada yang memulai usaha sendiri seperti (telor asin, bandeng presto, aneka keripik, serta susu sari kedelai) dengan berjualan di rumahnya serta dibantu dengan dipasarkan melalui web, bahkan sudah ada yang masuk di toko oleh-oleh yaitu aneka keripik dan nantinya jika usaha itu sukses maka mereka juga bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang pengangguran.

Bidang kesehatan, PKK menyelenggarakan sosialisasi kesehatan seperti stunting serta adanya pelayanan posyandu, keluarga berencana (KB), Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Pada bidang lingkungan PKK melakukan gotong royong dan kerja bhakti guna membersihkan jalan dan selokan-selokan yang ada di desa, melakukan penanaman toga dengan memanfaatkan lahan kosong di pekarangan rumah. Pemberdayaan hadir sebagai jawaban atas ketimpangan nyata pada struktur kekuasaan untuk mengatur diri mereka sendiri. Pemberdayaan yang intinya berkaitan dengan bagaimana individu, kelompok serta komunitas berusaha melakukan kontrol hidup pribadi mereka dan mengusahakan untuk masa depan yang sesuai dengan keinginan mereka. Setiap individu dapat mengambil pilihannya sendiri dalam mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi, membuktikan bahwa di dalam diri setiap manusia terdapat potensi yang bisa dikembangkan (Shardlow 1998 : 32). Dalam proses memberdayakan perempuan, upaya yang diperjuangkan berkaitan dengan terpenuhinya hak perempuan dalam menentukan pilihan hidup serta untuk memberikan pengaruh terhadap arah perubahan dengan dilakukan pengontrolan pada setiap potensi baik itu material ataupun non material. Pendekatan dalam pemberdayaan bukan hanya memfokuskan pada kepentingan meningkatnya “status” perempuan secara relatif terhadap kaum pria, tetapi lebih dari itu berupaya memberi kuasa perempuan melalui pembagian kekuasaan di dalam kehidupan masyarakat.

Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam upaya yang dilakukan untuk melaksanakan pemberdayaan perempuan adalah setiap tindakan PKK yang bertujuan untuk memberikan peningkatan potensi serta kemampuan yang dimiliki oleh kaum perempuan, supaya nantinya kaum perempuan secara mandiri dapat memiliki keahlian dan keterampilan untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah dengan cara yang bijak. Melalui kegiatan PKK, ibu rumah tangga yang sebelumnya diketahui hanya sebatas berkegiatan mengurus rumah tangga, menonton televisi di rumah, berbincang, membicarakan sesuatu yang kurang memiliki manfaat, tetapi melalui organisasi PKK para ibu rumah tangga tersebut bisa mendapat ilmu serta pengetahuan yang bermanfaat, dan dapat menerapkannya pada kehidupan sehari-hari, yang lebih menguntungkan lagi adalah para ibu rumah tangga dapat memiliki penghasilannya sendiri dan meningkatkan ekonomi keluarga, memiliki pola pikir kritis serta jaringan yang luas. Organisasi PKK merupakan sebuah gerakan yang dipilih langsung oleh para kader PKK, bukan seperti organisasi dharma wanita ataupun bhayangkari dimana organisasi tersebut diikuti karena keberadaan suami atau karena profesi seorang suami, sehingga peneliti sangat tertarik untuk mengkaji bagaimana seorang perempuan memaknai dirinya dalam organisasi PKK.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Sebab, penelitian ini penting untuk dilakukan karena sebelumnya belum pernah ada penelitian tentang ini. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul **“Perempuan Dan PKK : Suatu Kajian Etnografi Perempuan Di Organisasi PKK (Di Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran).”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman seorang perempuan tentang makna dirinya dan dunianya di organisasi PKK?
2. Bagaimana strategi kader PKK untuk mencapai program kerja PKK guna memberdayakan masyarakat?

3. Apa saja program unggulan yang dijadikan sebagai prioritas dalam pemberdayaan masyarakat?
4. Bagaimana Hasil Pemberdayaan yang Diterapkan PKK di Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji pemahaman seorang perempuan mengenai makna dirinya dan dunianya yang berada di organisasi PKK.
2. Untuk mengkaji strategi kader PKK dalam mencapai program kerja PKK guna memberdayakan masyarakat.
3. Untuk mengkaji program unggulan yang dijadikan sebagai prioritas oleh PKK.
4. Untuk mengkaji hasil dari pemberdayaan yang telah dilaksanakan oleh tim penggerak PKK di Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap penelitian ini dapat memperkaya studi etnografi (bagaimana) menjadi seorang pengurus inti serta kader dari organisasi masyarakat yaitu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Serta, diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan mahasiswa dengan melihat keterlibatan perempuan dalam organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

2. Secara Praktis

Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam studi pengembangan masyarakat, khususnya terkait pemberdayaan masyarakat. Serta, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan masukan bagi pihak-pihak terkait, demi

tercapainya keberhasilan program dan kemajuan program pemberdayaan masyarakat dimasa yang akan datang.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Perempuan

Secara etimologis, pengertian perempuan yaitu berasal dari kata empu yang memiliki arti “tuan”, kepala, hulu, orang yang mahir atau berkuasa, yang paling besar. Zaitunah Subhan dalam bukunya juga mengartikan perempuan yang berasal dari kata empu yang berarti dihargai. Di sisi lain feminisme perempuan mengungkapkan, bahwa perempuan adalah sebuah istilah konstruksi sosial yang identitasnya dikonstruksi dan ditetapkan dengan memberikan gambaran.

Sementara Rosaldo (1974) menyatakan bahwa perempuan memiliki kecenderungan untuk beraktivitas di dalam rumah, hal ini dikarenakan seorang perempuan sudah seharusnya melaksanakan peran sebagai seorang ibu. Dengan adanya orientasi tersebut juga berhubungan erat dengan anak-anak dan memungkinkan perempuan mendapatkan wewenang tersendiri di dalam rumah. Dalam peradaban Yunani pada zaman dahulu, perempuan dianggap sangat rendah dan hina. Perempuan kalangan bawah dianggap sama rendahnya dengan barang dagangan yang bisa diperjualbelikan. Perempuan sudah secara lumrah dirampas dan tidak diakui hak-hak sebagai mana masyarakat pada umumnya. Perempuan dalam organisasi PKK memiliki peran yang strategis dalam pembangunan kesejahteraan keluarga, oleh karena itu kesetaraan gender atas kesempatan

Perempuan untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan harus didukung secara penuh.

2.2 Tinjauan Tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

2.2.1 Sejarah PKK

PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) merupakan sebuah organisasi yang telah berdiri sejak tahun 1957. Menurut sejarahnya, organisasi PKK berawal ketika diadakan sebuah seminar atau diskusi yang dilaksanakan di Bogor dengan tema *home economic*, dan menghasilkan rumusan 10 segi kehidupan keluarga. Kemudian, ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yaitu pada tahun 1961 yang menetapkan 10 segi kehidupan keluarga sebagai kurikulum pendidikan kesejahteraan keluarga yang diajarkan di sekolah-sekolah dan pendidikan masyarakat (PENMAS).

Pada tanggal 27 Desember 1972 Menteri Dalam Negeri mengirimkan Surat Kawat Nomor: Sus 3/6/12 kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mengubah nama Pendidikan Kesejahteraan Keluarga menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Kemudian, tembusan ini disampaikan kepada Gubernur di seluruh Indonesia. Untuk mencapai cita-cita keluarga sejahtera dengan tidak membeda-bedakan golongan, agama, partai dan lain-lain. Hal tersebut menarik perhatian pemerintah yang pada kelanjutannya organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) diatur dan dibina oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Berdasarkan

keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang perubahan LSD menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan PKK sebagai seksi ke 10 di LKMD.

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1982, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Pusat dibentuk dan dipimpin oleh istri Menteri Dalam Negeri pada tahun 1982. Kemudian dilaksanakan pemantapan organisasi PKK terkait dengan pengorganisasian serta pengelolaannya dengan dilaksanakan pelatihan, orientasi, rakon ataupun rakernas.

Pada sidang Umum MPR Tahun 1983, berdasarkan Tap MPR Nomor II/MPR/1983 tentang GBHN. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ditetapkan sebagai salah satu wahana meningkatkan peran perempuan pada proses pembangunan. Kemudian, pada tahun 1984 Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Keputusan Nomor 28 Tahun 1984 tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang menetapkan tentang pengertian, tujuan, sasaran, fungsi, tugas organisasi PKK dan ketentuan atributnya.

Selanjutnya pada tahun 1998 yaitu pada masa reformasi, sejalan dengan penguatan demokratisasi aspek pemberdayaan dari, oleh dan untuk masyarakat menjadi hal yang sangat dipentingkan. Hal ini direspon dengan dilakukannya penguatan arah kelembagaan menjadi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Dalam proses selanjutnya, strategi

gerakan masyarakat dikembangkan untuk mempertajam proses peningkatan kesejahteraan keluarga.

Sesuai dengan era reformasi dan GBHN tahun 1999 yaitu ada perubahan paradigma baru mengenai pembangunan serta otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Tim Penggerak PKK Pusat menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Luar Biasa (RAKERNASLUB) pada tanggal 31 Oktober sampai dengan tanggal 02 November pada tahun 2000 di Bandung. Hasil kesepakatan RAKERNASLUB PKK tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Menurut Permendagri Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga dijelaskan bahwa Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut dengan Gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju

terwujudnya Keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan (Permendagri Nomor 36 Tahun 2020).

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.

2.2.2 Visi dan Misi Gerakan PKK

a. Visi

Terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera lahir dan batin.

b. Misi

- Meningkatkan pembentukan karakter keluarga melalui penghayatan, pengamalan Pancasila, kegotong royongan serta kesetaraan dan keadilan gender.
- Meningkatkan pendidikan dan ekonomi keluarga melalui berbagai upaya keterampilan dan pengembangan koperasi.
- Meningkatkan ketahanan keluarga melalui pemenuhan pangan, sandang dan perumahan sehat dan layak huni.

- Meningkatkan derajat kesehatan keluarga, kelestarian lingkungan hidup serta perencanaan sehat.
- Meningkatkan pengelolaan gerakan PKK meliputi kegiatan pengorganisasian dan peningkatan sumberdaya manusia.

2.2.3 Tugas Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

- a. Merencanakan, melaksanakan, dan membina pelaksanaan program-program tugas pokok PKK, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat.
- b. Menghimpun, menggerakkan, dan membina potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk terlaksananya program-program tugas pokok PKK.
- c. Memberikan bimbingan, motivasi, dan memfasilitasi tugas pokok PKK/ kelompok-kelompok PKK dibawahnya.
- d. Menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada ketua pembina TP PKK setempat dan kepada ketua umum/ketua TP PKK setingkat diatasnya.
- e. Mengadakan supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan (SMEP), terhadap pelaksanaan program-program TP PKK.

2.2.4 Fungsi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program TP PKK. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina, dan pembimbing TP PKK.

2.2.5 Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

10 Program pokok PKK, yaitu:

1. Penghayatan dan pengamalan Pancasila
2. Gotong royong
3. Pangan
4. Sandang
5. Perumahan dan tata laksana rumah tangga
6. Pendidikan dan keterampilan
7. Kesehatan
8. Pengembangan kehidupan berkoperasi
9. Kelestarian lingkungan hidup
10. Perencanaan sehat

2.2.6 Tugas Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Desa

1. Menyusun rencana kerja TP PKK Desa/kelurahan, sesuai dengan hasil rakerda Kabupaten/Kota.
2. Memberikan informasi, melakukan komunikasi dan konsultasi rencana kerja TP PKK Desa/kelurahan melalui Kepala Desa/Lurah kepada camat yang kemudian diteruskan kepada Bupati/walikota melalui SKPD yang membidangi urusan Pembinaan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten/Kota selaku Pembina TP PKK, agar rencana kerja TP PKK Desa/Kelurahan menjadi tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan pembangunan pada pemerintah daerah Kabupaten/kota.

3. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati.
4. Melakukan penyuluhan dan menggerakkan kelompok PKK Dusun agar dapat merealisasikan daftar kegiatan yang telah disepakati dan disusun.
5. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, secara khusus keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
6. Melakukan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang di dalamnya terdiri dari proses bimbingan, memotivasi, sebagai upaya mencapai keluarga sejahtera.
7. Memberi pembinaan serta bimbingan berkaitan dengan pelaksanaan program kerja yang telah disepakati dan disusun
8. Berpartisipasi pada setiap kegiatan ataupun program instansi terkait yang sesuai dengan kesejahteraan keluarga di Desa/kelurahan.
9. Melaporkan hasil kegiatan kepada ketua Pembina TP PKK Desa/Kelurahan dan TP PKK Kecamatan.
10. Melaksanakan tertib administrasi.
11. Berkonsultasi dan koordinasi dengan ketua, anggota, ataupun Pembina TP PKK Desa/Kelurahan.

Gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) adalah salah satu wadah yang diberikan untuk perempuan oleh pemerintah. Pengelolaannya terdiri dari lingkup terendah berupa satuan pokok kerja (pokja) hingga tingkat nasional dibawah naungan Menteri Dalam Negeri. PKK juga dikelola oleh perempuan-perempuan akar rumput (*grass root*) yang menandakan bahwa pemerintah

memberi kesempatan kepada para perempuan untuk berpartisipasi aktif. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan PKK dapat dirasakan secara langsung oleh perempuan yang aktif tergabung dalam PKK diseluruh tingkatan. Keunggulan dari PKK adalah anggotanya terdiri dari seluruh perempuan (istri) yang keluarganya terdaftar dalam kartu keluarga dan kependudukan. PKK tidak memberikan syarat anggota yang berpartisipasi memiliki jenjang pendidikan atau memiliki pengalaman.

Dalam organisasi PKK siapapun masyarakat khususnya perempuan, berlatarbelakang pendidikan apapun, beragama, dan bersuku apapun diizinkan secara bebas untuk aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan. PKK hanya memberikan kewajiban berupa pengamalan sepuluh program pokok yang kemudian bisa dikembangkan oleh anggotanya sesuai dengan potensi dan sumber yang tersedia di masing-masing kelompok wilayah. Oleh karena itu, melalui PKK perempuan sudah melakukan usaha produktif dalam rumah tangga ataupun dalam masyarakat, guna menciptakan kesejahteraan baik untuk keluarga ataupun untuk masyarakat.

2.3 Tinjauan Tentang Gender dan Organisasi

Gender merupakan konsep yang merujuk pada sistem peranan dan behubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak bisa ditentukan oleh perbedaan biologis, namun oleh lingkungan sosial, politik, dan ekonomi. Gender adalah sebuah variabel sosial untuk menganalisa perbedaan laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan peran, tanggung jawab dan kebutuhan serta peluang dan

hambatan (Rostyaningsih, 2010). Selain itu, menurut WHO gender merupakan seperangkat peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap sesuai bagi laki-laki dan perempuan yang memang sudah dikonstruksikan dalam lingkungan sosial masyarakat.

Mansour Fakih (2014) menjelaskan arti gender yaitu sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki serta perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya perempuan dikenal dengan mempunyai sifat yang lemah, cantik, keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, jantan, rasional, dan perkasa. Sehingga dapat disimpulkan disini bahwa gender merupakan sifat non kodrati sedangkan seks atau jenis kelamin merupakan sifat kodrati.

Sedangkan pengertian organisasi, menurut James D. Money dalam Abdulsyani, dkk (2018) merupakan setiap bentuk kerjasama untuk pencapaian suatu tujuan bersama. Ciri-ciri organisasi yaitu dimana ada atasan dan bawahan, kerjasama, tujuan, sasaran, keterikatan formal, dan pendelegasian wewenang dan koordinasi tugas-tugas. Dengan memiliki tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan mereka, contohnya yaitu sekolah, rumah sakit, kantor-kantor pemerintahan, dsb.

Senada dengan yang dikemukakan oleh Manullang, juga Herbert G. Hicks (1972) dalam bukunya yang berjudul "*the management of organizations : A System and Human Resources Approach*" dalam Abdulsyani, dkk (2018), menyebutkan bahwa terdapat beberapa ciri yang merupakan dasar umum dari setiap organisasi, yaitu:

1. Bahwa organisasi itu mencakup (sejumlah orang-orang).

2. Orang-orang itu melibatkan diri satu sama lain, mereka berinteraksi secara intensif atau sekedarnya.
3. Interaksi itu selalu dapat disusun atau digambarkan dalam sebuah struktur.
4. Setiap orang dalam organisasi mempunyai tujuan perseorangan. Sebagian daripadanya merupakan alasan tindakannya. Dengan turut serta dalam organisasi itu, ia mengharapkan agar organisasi tersebut akan membantu mencapai tujuannya.
5. Interaksi tersebut juga dapat membantu mencapai tujuan bersama yang harmonis, mungkin berbeda, tetapi berhubungan dengan tujuan perseorangan mereka.

Abdulsyani, dkk (2018) mendefinisikan organisasi sebagai sebuah proses yang berstruktur, tempat orang-orang dapat berinteraksi untuk mencapai sebuah tujuan bersama atau beberapa tujuan tertentu. Stephen P. Robbins mengatakan organisasi sebagai suatu entitas sosial yang terkoordinasi secara sadar, terdapat batasan yang relatif dan teridentifikasi, memiliki fungsi yang berkesinambungan untuk mencapai sebuah atau seperangkat tujuan bersama. E. Wight Bakke dalam Kusdi mengemukakan bahwa organisasi adalah sebuah sistem berkelanjutan yang terdeferensiasi dan terkoordinasi dari aktivitas-aktivitas manusia dengan mempergunakan, mentransformasikan, dan menyatukan seperangkat khusus manusia, gagasan, material, modal, dan sumber dayayang ada menjadi sebuah kesatuan pemecahan masalah dalam rangka memberi kepuasan manusia dalam interaksinya dengan sistem lain dari aktivitas manusia dan sumber daya dalam lingkungannya. Dengan demikian organisasi dapat diartikan sebagai sebuah

perwujudan sosial yang dikoordinasikan secara sadar oleh sekelompok orang secara terus menerus untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai seorang diri. Gender dalam organisasi selalu diidentikan dengan jenis kelamin, dimana laki-laki selalu dianggap kuat dan berani sehingga pantas untuk masuk kedalam dunia publik sedangkan perempuan yang memiliki sifat lemah lembut selalu diidentikan dengan ranah domestik. Sebagaimana Bharati Sadasivam (2017), Penasihat Gender Regional untuk Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) di Eropa dan Asia Tengah, menyatakan bahwa: “Di seluruh dunia, perempuan melakukan dua kali lebih banyak pekerjaan rumah tangga dan perawatan yang tidak dibayar termasuk membesarkan anak, merawat orang sakit atau anggota keluarga lanjut usia, dan mengelola rumah tangga. Di Meksiko, India, dan Turki, perempuan melakukan pekerjaan perawatan tiga kali lebih banyak. Laki-laki yang membatasi pilihan perempuan, menghambat kemampuan untuk memperoleh pendidikan formal, menghambat untuk mendapatkan pekerjaan yang baik”.

Hal ini dapat kita analisa bahwa sesungguhnya perempuan ketika berada dalam organisasi belum sepenuhnya mendapatkan kebebasan, dimana perempuan secara struktural budaya mendapatkan stigma bahwa peran perempuan itu selalu diidentikan dengan ranah domestik yang hanya mengurus rumah, anak, dan keluarga. Senada dengan pernyataan yang diungkapkan oleh (McRobbie, 2009) bahwa kebebasan bergerak perempuan baik secara fisik maupun simbolis dalam organisasi masih dibatasi.

Intervensi tersebut secara implisit atau eksplisit dibangun di atas ide-ide *postfeminist* tentang perempuan sebagai subjek yang lunak, mendesak mereka untuk membentuk diri mereka menuju wanita karir yang ideal sejalan dengan norma-norma maskulin. Tidak sulit untuk melihat bagaimana ide-ide *postfeminist* ini secara bersamaan merupakan proyek feminis neoliberal: dimana mereka menekankan bagaimana perempuan berwirausaha secara individualistis dan harus merangkul otonomi yang bertanggung jawab penuh atas kehidupan dan karir mereka sendiri (Rottenberg, 2014). Sebaliknya, proses organisasi yang menopang gagasan “karir” dan “pemimpin” ini cenderung dikonstruksi sebagai kenyataan, dan perempuanlah yang harus memperbaiki diri, mengambil kendali, dan “bersandar” dengan tujuan untuk menghindari kegagalan (Sandberg, 2013). Sarjana feminis telah lama menekankan bagaimana struktur sosial memungkinkan beberapa pilihan dan menghalangi yang lain dimana peraturan kerja struktural menganggap pekerja yang tidak terbebani dimana norma waktu dan komitmen profesional mengaburkan stigma fleksibilitas kualitas perempuan secara sistematis diremehkan dan para pemimpin perempuan menghadapi dilema ikatan ganda (Van den Brink dan Benschop, 2014).

Peran perempuan dalam organisasi PKK menjadi sangat penting dan sangat dibutuhkan, dimana perempuan dengan segala kualitas dan loyalitasnya dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan. Sehingga perempuan yang bergabung dalam keorganisasian PKK seharusnya didukung penuh oleh seluruh pihak yaitu baik keluarga, masyarakat dan pemerintah guna memperbaiki stigma bahwa perempuan selalu diidentikan dengan ranah domestik yang tidak memiliki kebebasan dalam

mengambil peran publik di masyarakat. hal ini digunakan untuk mewujudkan kesuksesan program PKK bukan hanya memerlukan sebuah energi, tetapi juga membutuhkan sinergi antar kader PKK dan dukungan dari pihak terkait agar tujuan tercapai secara bersama-sama melalui sebuah organisasi yang terdiri dari beberapa orang didalamnya.

2.4 Tinjauan Tentang Pemberdayaan

Pemberdayaan atau *empowerment*, berasal dari kata '*power*' yang memiliki arti kekuasaan atau keberdayaan, sebab ide utama dari pemberdayaan berkaitan langsung dengan konsep kekuasaan (Suharto, 2005: 57). Pemberdayaan memiliki keterkaitan dengan kemampuan manusia secara perorangan maupun manusia dalam kelompok yang rentan dan lemah. Disini, Suharto (2005: 58) menyatakan bahwa, pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dalam:

1. Melakukan pemenuhan kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), kebebasan yang bukan hanya sebatas bebas dalam mengemukakan pendapat, tetapi juga bebas dari kelaparan, kebodohan, dan kebebasan dari kesakitan.
2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memberikan kemungkinan untuk dapat meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang serta jasa yang diperlukan.
3. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan proses pembangunan dan memengaruhi diri mereka.

Pemberdayaan bisa dipahami secara berbeda berdasarkan sudut pandang orang ataupun hubungannya dengan kelembagaan, politik serta sosial budaya. Misalnya Sutoro Eko (2005: 150-151) yang memberikan makna pemberdayaan dengan menempatkan masyarakat bukan sebagai obyek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, tetapi sebagai subjek yang sifatnya mandiri. Di samping itu, pemberdayaan juga dipandang sebagai sebuah upaya memberikan kuasa sebagai respon atas ketidakberdayaan (*powerless*) masyarakat. Dari sudut pandang kekuasaan, terdapat beberapa pemahaman tentang pemberdayaan. Yaitu, sebagai berikut (Sutoro Eko, 2005: 151):

1. Pemberdayaan bertujuan meningkatkan kekuasaan kelompok-kelompok yang lemah atau tidak beruntung (Jim Ife, 1995).
2. Pemberdayaan adalah sebuah proses yang membuat orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parros, 1994).
3. Pemberdayaan menunjukkan pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial (Swift dan Levin, 1987).
4. Pemberdayaan adalah suatu cara mengarahkan rakyat, organisasi dan komunitas agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (Rappaport, 1984).

Lebih lanjut, Ife (1995: 61-62) berpendapat bahwa pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

1. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup, yaitu kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal dan pekerjaan.
2. Pendefinisian kebutuhan yaitu seperti kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
3. Ide dan gagasan yaitu kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
4. Lembaga-lembaga yaitu kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan.
5. Sumber-sumber yaitu kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
6. Aktivitas ekonomi yaitu kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
7. Reproduksi yaitu kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Sedangkan menurut Saleebey (1992: 45) dalam penjelasannya yang dikutip dari *Cornell University Empowerment Group* bahwasanya pemberdayaan adalah suatu proses yang disengaja dan terus menerus dipusatkan pada komunitas lokal,

meliputi saling menghormati, sikap refleksi kritis, kepedulian dan partisipasi kelompok, melalui masyarakat yang merasa kurang memiliki secara bersama sumber-sumber yang berharga, memperoleh akses yang lebih besar untuk mendapatkan dan mengontrol sumber-sumber tersebut.

2.4.1 Prinsip Pemberdayaan

Adapun menurut Najati (2005:54) ada empat prinsip yang biasa digunakan dalam melaksanakan suatu program pemberdayaan:

1. Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program pemberdayaan merupakan prinsip utama yang harus dipegang pada proses pemberdayaan masyarakat. Membangun dinamika hubungan yang setara dengan melakukan pengembangan metode dengan berbagai macam bentuk keahlian, ilmu pengetahuan, serta pengalaman, sehingga terjadinya pembelajaran.

2. Prinsip Partisipasi

Program pemberdayaan mampu mendorong masyarakat yang mandiri, berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan berbagai program yang telah direncanakan, diawasi, serta dievaluasi oleh masyarakat. Untuk itu tersebut diperlukan waktu dan proses pendampingan yang memiliki komitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

3. Prinsip Kemandirian atau Keswadayaan

Menghargai serta mengutamakan kemampuan masyarakat, bukan bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang tidak mampu sebagai objek yang tidak berkemampuan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit yang tetap dapat diberdayakan.

4. Prinsip Berkelanjutan

Program pemberdayaan harus diatur serta memiliki rancangan untuk dapat dilaksanakan berkelanjutan, walaupun awalnya para pendamping lebih mendominasi dibandingkan masyarakat itu sendiri. Tetapi kemudian perlahan peran pendamping semakin berkurang bahkan hilang karena masyarakat telah mampu mengelola kegiatan mereka sendiri.

Berangkat dari pemahaman mengenai pemberdayaan sebagai sebuah sistem pendidikan, Mardikanto (2013:105) berpendapat bahwa terdapat prinsip-prinsip pemberdayaan sebagai berikut:

1. Mengerjakan kegiatan pemberdayaan harus melibatkan masyarakat yang banyak untuk menerapkan/melaksanakan sesuatu. Dengan proses tersebut masyarakat dapat belajar (baik dengan menggunakan perasaan, pikiran dan keterampilannya) yang dapat selalu diingat untuk jangka waktu yang lama.
2. Akibat, artinya kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau berpengaruh baik dan bermanfaat. Perasaan senang atau tidak senang akan mempengaruhi semangat untuk mengikuti kegiatan belajar dalam pemberdayaan di masa yang akan datang.

3. Asosiasi, artinya setiap kegiatan pemberdayaan harus memiliki keterkaitan dengan kegiatan lain.

2.4.2 Tujuan Pemberdayaan

Pemberdayaan sebagai perwujudan dari strategi pembangunan yang berdasar kemasyarakatan (*people centered development*). Berkaitan dengan hal tersebut, pembangunan bertujuan sebagai usaha perbaikan mutu hidup manusia secara fisik, mental, ekonomi maupun sosial budaya. Mardikanto (2013: 109) mengemukakan enam tujuan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

1. Perbaikan Kelembagaan (*Better Institution*)

Dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan diharapkan akan memperbaiki kelembagaan termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.

2. Perbaikan Usaha (*Better Business*)

Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

3. Perbaikan Pendapatan (*Better Income*)

Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki pendapatan yang diperoleh, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.

4. Perbaikan Lingkungan (*Better Environment*)

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial) karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

5. Perbaikan Kehidupan (*Better Living*)

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang baik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

6. Perbaikan masyarakat (*Better Community*)

Kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan akan menimbulkan terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

2.4.3 Tahapan Pemberdayaan

Menurut Wilson dalam Mardikanto (2013:122) terdapat beberapa tahapan pemberdayaan sebagai berikut:

1. Menumbuhkan rasa ingin berubah dan memperbaiki diri pada seseorang sebagai titik awal perlunya dilakukan pemberdayaan. Tanpa ada rasa ingin berubah serta melakukan perbaikan maka semua upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak akan mendapat simpati atau perhatian dan partisipasi dari masyarakat.
2. Menumbuhkan kemauan dan keberanian keluar diri zona nyaman dan menyingkirkan hambatan yang ada, kemudian mengambil keputusan untuk mengikuti program pemberdayaan untuk mewujudkan perubahan dan perbaikan sesuai dengan keinginan.
3. Mau untuk mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang dapat memberi manfaat ataupun perbaikan keadaan.

4. Peningkatan partisipasi serta berperan aktif dalam kegiatan pemberdayaan yang dirasa telah memberi manfaat/perbaikan.
5. Peningkatan kesetiaan pada kegiatan pemberdayaan yang ditunjukkan berkembangnya motivasi untuk melakukan perubahan.
6. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan.
7. Peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan baru.

2.4.4 Strategi Pemberdayaan

Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah sebuah kegiatan yang bertujuan jelas dan harus tercapai, oleh sebab itu dalam melaksanakan setiap program pemberdayaan masyarakat diperlukan landasan suatu strategi kerja dengan tujuan untuk mencapai keinginan yang telah ditetapkan. Strategi juga sering diartikan sebagai tahapan langkah atau sebuah tindakan tertentu yang dilaksanakan untuk tercapainya suatu tujuan. Adapun menurut Mardikanto (2013:167) strategi pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Strategi sebagai suatu rencana
2. Strategi sebagai kegiatan
3. Strategi sebagai suatu instrumen
4. Strategi sebagai sistem
5. Strategi sebagai pola pikir

Ruslan (2010:80) berpandangan bahwa upaya pemberdayaan adalah sebuah proses yang dapat membuat perempuan memiliki kemampuan

untuk membuat pilihan secara mandiri dan bijaksana. Konsep ini menawarkan titik terang terhadap peran dan posisi sosial perempuan yang setara dengan laki-laki, terbebas dari kemiskinan dan kebodohan, serta faktor lain yang dapat menjadi penghambat berkembangnya diri perempuan, sehingga muncul PKK sebagai sebuah alternatif konsep dalam pemberdayaan perempuan.

2.5 Tinjauan Tentang Makna

Fisher (Sobur:2015;19) mendefinisikan makna sebagai sebuah konsep abstrak, yang telah menarik perhatian para teoritis ilmu sosial dan para ahli filsafat selama 20 abad yang lalu. Semenjak Plato memberikan konsep dan pemaknaan manusia sebagai salinan “ultrarealitas”, para pemikir besar telah sering mempergunakan konsep itu dengan penafsiran yang sangat luas sejak pengungkapan mental dari Locke sampai ke respons yang dikeluarkan dari Skinner. Semua ahli komunikasi, seperti dikutip Jalaluddin Rakhmat (1996), sepakat bahwa makna kata sangat subjektif *words don't mean, people mean* (Sobur:2015;20). Seperti yang dijelaskan oleh De Vito bahwa “Makna ada dalam diri manusia. Makna adalah proses aktif yang ditafsirkan seseorang dalam suatu pesan”. Ada tiga hal yang dijelaskan para filsuf dan linguis sehubungan dengan usaha menjelaskan istilah makna. Ketiga hal itu, yakni:

1. Menjelaskan makna secara alamiah
2. Mendeskripsikan kalimat secara alamiah
3. Menjelaskan makna dalam proses komunikasi

Oleh karena itu istilah makna mempunyai banyak pengertian. Menurut F.R Plamer dikutip Sobur (2015;24), untuk bisa memahami apa yang disebut dengan makna, kembali ke teori Ferdinand de Saussure. Dimana dalam bukunya, *Course in General Linguistik* (1916), de Saussure menyebut tanda *linguistik*. “Tiap tanda linguistik terdiri atas dua unsur, yakni yang diartikan (unsur makna) dan yang mengartikan (unsur bunyi). Kedua unsur ini, yang disebut unsur intralingual, biasanya merujuk pada sesuatu referen yang merupakan unsur ekstralingual”. Sedangkan kata Peursen “Manusia ditandai dengan kata” (Sobur:2015;24).

2.5.1 Tipe-tipe makna

Menurut Brodbeck (1993) sebagaimana dikutip oleh Sobur (2015;26-26) berpandangan bahwa terdapat tiga pengertian berkaitan dengan konsep makna, yaitu:

1. Makna *referensial*; dimana makna suatu istilah adalah objek, ide atau konsep, pikiran yang ditunjukkan oleh istilah tersebut.
2. Makna adalah arti istilah itu. Suatu istilah dapat saja memiliki arti referensi dalam pengertian yang pertama, yakni mempunyai referen, tetapi karena ia tidak dihubungkan dengan berbagai konsep yang lain, ia tidak mempunyai arti.
3. Makna mencakup yang dimaksudkan (*intentional*) dalam arti bahwa suatu istilah atau lambang bergantung pada apa yang dimaksudkan pemakai dengan arti lambang itu.

Cara serta sikap seorang individu dalam memandang dirinya sendiri, sebuah pandangan atau perspektif diri yang meliputi aspek fisik maupun aspek psikis, seperti mengenal karakteristik individu itu sendiri, tingkah laku dan perbuatannya, kemampuan diri, dan sebagainya. Tidak hanya kekuatan diri individu itu saja yang tercakup di dalamnya, melainkan kelemahan beserta dengan kegagalan yang ada pada dirinya. *Self concept* diartikan sebagai pandangan serta penilaian individu terhadap dirinya sendiri. Hal tersebut bermanfaat sebagai dasar atau landasan berperilaku dalam rangka menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Maka dari itu, perlu untuk menciptakanlah *self concept* yang bermakna positif ataupun baik agar mampu membentuk kepribadian yang baik pula.

2.6 Tinjauan Tentang Motivasi Berorganisasi

Motivasi merupakan suatu proses psikologis yang mencerminkan interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi dan keputusan yang terjadi pada diri seseorang (Wexley & Yukl, 1984). Motivasi diartikan sebagai sesuatu yang penting (*Important Subject*) dan motivasi sebagai sesuatu yang sulit (*Puzzling Subject*). Motivasi berpangkal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai daya penggerak yang ada di dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Bahkan motivasi dapat diartikan sebagai suatu kondisi intern (kesiapsiagaan). Adapun menurut Mc. Donald, motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya "*feeling*" dan di dahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Dari pengertian yang

dikemukakan oleh Mc. Donald ini mengandung tiga elemen/ciri pokok dalam motivasi itu, yakni motivasi itu mengawalinya terjadinya perubahan energi, ditandai dengan adanya *feeling*, dan dirangsang karena adanya tujuan.

Maslow (dalam Wijono, 2007) yang telah menyusun kebutuhan-kebutuhan manusia dalam lima tingkatan yang akan dicapai menurut tingkat kepentingannya sebagai berikut:

a. Kebutuhan fisiologis

Yaitu kebutuhan seperti rasa lapar, haus, seks, rumah, tidur dan sebagainya.

b. Kebutuhan keamanan

Kebutuhan akan keselamatan dan perlindungan dari bahaya, ancaman, dan perampasan.

c. Kebutuhan sosial

Kebutuhan akan rasa cinta dan kepuasan menjalin hubungan dengan orang lain. Kepuasan dan perasaan saling memiliki serta diterima dalam suatu kelompok, rasa kekeluargaan, persahabatan dan kasih sayang.

d. Kebutuhan penghargaan

Yaitu kebutuhan akan status atau kedudukan, kehormatan diri, reputasi dan prestasi.

e. Kebutuhan aktualisasi diri

Yaitu kebutuhan pemenuhan diri, untuk mempergunakan potensi diri, pengembangan diri semaksimal mungkin, kreativitas, ekspresi diri dan melakukan apa yang cocok. Serta menyelesaikan pekerjaannya sendiri.

Berdasarkan paparan diatas, maka motivasi dapat diartikan sebagai seperangkat kekuatan energi yang berasal dari dalam tubuh individu, yang menjadi dorongan dasar seseorang dalam berperilaku untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan motivasi berorganisasi menurut Wexley dan Yukl adalah sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan untuk bekerja dan berorganisasi. McCormick (dalam Utamie, 2009) mengemukakan bahwa motivasi berorganisasi merupakan kondisi yang membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan organisasi. Sementara itu Stanford (dalam Utamie, 2009) mendefinisikan motivasi berorganisasi sebagai suatu kondisi yang menggerakkan manusia ke arah suatu tujuan di dalam organisasi.

Selanjutnya Herzberg (Pinder, 1998) menggolongkan motivasi terbagi ke dalam dua yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang bersumber dari dalam diri individu tersebut, sementara motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dari individu. Beberapa contoh motivasi intrinsik dalam berorganisasi adalah manusia berorganisasi untuk mencapai kebutuhannya, manusia melakukan sesuatu dalam organisasi karena mendapat kepuasan dari hal tersebut, dan manusia berperilaku tertentu dalam rangka mencapai harapannya di dalam organisasi. Sedangkan beberapa contoh motivasi ekstrinsik seperti relasi dengan sesama baik di dalam maupun di luar organisasi, kebijakan organisasi, keamanan kerja, budaya organisasi, kondisi kerja, imbalan, peraturan kerja.

Gibson (dalam Utamie, 2009) mengemukakan bahwa individu yang memiliki motivasi tinggi dapat dilihat atau dicirikan dengan sikap dan perilaku, yaitu antara lain:

- a. Sikap menyatu dengan pekerjaan. Individu selalu memprioritaskan pekerjaan.
- b. Bertanggung jawab secara kreatif dan inovatif. Individu dalam bekerja berani menerapkan ide-ide yang menghasilkan kreasi dan inovasi baru.
- c. Kemampuan memperhitungkan dan menanggung resiko
Individu mampu untuk memprediksi resiko yang ada di dalam pekerjaannya dan dapat mengambil keputusan yang baik ketika menghadapi sebuah kesempatan.
- d. Semangat kerja sama
Individu dalam bekerja memiliki kemampuan untuk bekerja secara team.
- e. Optimisme berkarir
Individu memiliki pandangan positif terhadap perjalanan pekerjaannya di masa depan.
- f. Rasa memiliki
Individu menjadikan masalah pekerjaan sebagai bagian pribadi dirinya.
- g. Keinginan umpan balik. Individu selalu menginginkan *feedback* dari pekerjaannya.

Berdasarkan uraian di atas, motivasi berorganisasi dapat disimpulkan sebagai seperangkat kekuatan energi yang berasal dari dalam tubuh individu, yang menjadi dorongan dasar seseorang dalam berperilaku untuk memenuhi kebutuhan dalam organisasi yakni kebutuhan kekuasaan, afiliasi, dan berprestasi. Dan

individu yang mempunyai motivasi berorganisasi tinggi akan mempersepsikan bahwa keberhasilan merupakan akibat dari kemauan dan usaha. Seberapa kuat motivasi berorganisasi seseorang akan mempengaruhi kualitas perilaku yang ditampilkannya saat berorganisasi.

2.7 Teori Identitas Sosial (Henry Tajfel)

Identitas sosial memiliki pengertian sebagai pengetahuan dan kesadaran dalam diri individu bahwa ia berada dalam bagian sebuah kelompok dan menjadi milik dari kelompok sosial tersebut bersamaan dengan beberapa nilai dan pemaknaan emosional dari keanggotaan sebuah kelompok (Tajfel 1972:31), sedangkan kelompok sosial didefinisikan sebagai dua atau lebih individu yang terdiri dari berbagai macam identifikasi sosial secara umum ataupun secara pribadi yang hampir sama satu sama lain, hal ini berarti individu beranggapan diri mereka sebagai anggota dari kategori sosial yang sama (Turner 1982:15).

Teori ini menekankan pada psikologi individu sebagai hasil atau produk kehidupan kelompok yang membedakan realitas psikologi dan sosial. Merubah pandangan dari yang awalnya hanya sebatas aku menjadi kami atau kita. Identitas sosial terdiri dari komponen "kita" atas konsep diri yang mencakup semua kualitas yang berkaitan dengan hubungan orang lain, kelompok, dan masyarakat. Identitas sosial muncul dari tokoh Joe Goerman yang memiliki jawaban dari pertanyaan "Siapakah Anda?". Goerman sebagai seorang *collectivism* akan bercerita tentang keluarganya, komunitas, dan kampung halamannya.

Sedangkan identitas sosial menurut Taylor dan Moghaddam (dalam Susetyo halaman 58-65) identitas individu yang tampil dalam setiap interaksi sosial disebut dengan Identitas sosial. Identitas sosial yaitu bagian dari konsep diri individu sebagai anggota dari suatu kelompok sosial, dimana di dalamnya mencakup nilai dan emosi-emosi penting yang melekat dalam diri individu sebagai anggotanya. Definisi lain oleh Billig (dalam Sarwono, 2001, h. 22) mengungkapkan bahwa identitas sosial adalah sebuah proses yang mengkaitkan individu pada kelompoknya dan yang menyebabkan individu menyadari diri atas sosialnya (*social self*). Sama halnya dengan Billig, Baron dan Byrne (2004, h. 163) mengartikan identitas sosial sebagai definisi seseorang tentang siapa dirinya.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa identitas sosial merupakan atribut yang dimiliki oleh seseorang dimana ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu kelompok sosial, lalu untuk memperkenalkan dirinya, individu tersebut menggunakan atribut yang ada padanya, selain itu dengan adanya atribut dapat menjadi pembeda antara kelompok sosial miliknya dengan kelompok sosial yang lain. Setiap anggota dalam sebuah kelompok sosial memiliki rasa kedekatan serta karakteristik atau ciri-ciri tertentu yang berbeda satu sama lain. Hubungan yang terbangun di dalam sebuah kelompok tidak terbatas pada fisik semata, atau misalnya hanya berkaitan dengan intensitas bertemu, tetapi juga berkaitan dengan kedekatan secara psikologis sesama anggota sebuah kelompok dengan pemikiran dan tujuan yang sama.

Setiap kader yang tergabung dalam organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) akan memperoleh identitas diri dan makna diri mereka secara masing-masing melalui pelabelan dan atribut sosial darimana tempat mereka berasal. Kategori sosial individu yang berbeda tersebut dengan demikian memiliki potensi identitas yang banyak dan berbeda. Identitas sosial juga adalah sebuah persamaan dan perbedaan berkaitan dengan personal dan sosial. Apa yang menjadi milikmu secara bersama-sama dengan beberapa orang lain dan apa yang menjadi pembeda antara kamu dengan orang lain.

Oleh karena itu untuk menunjukkan identitas sosial para kader organisasi PKK, maka sangat tergantung dengan setiap tindakan yang dilaksanakan pada hidup kelompok sosial tempat individu tersebut tergabung, karena identitas sosial sebuah kelompok terdapat ciri dan keunikannya masing-masing, ciri yang berbeda anatar kelompok sosial.

2.8 Teori Interaksionisme Simbolik

George Herbert Mead mengembangkan konsep atau teori yang dikenal sebagai Interaksionisme Simbolik. Mead mengemukakan bahwa dalam teori Interaksionisme Simbolik, ide dasarnya adalah sebuah simbol, karena simbol ini adalah suatu konsep mulia yang membedakan manusia dari binatang. Simbol ini muncul akibat dari kebutuhan setiap individu untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan dalam proses berinteraksi tersebut pasti ada suatu tindakan atau perbuatan yang diawali dengan pemikiran.

Dalam tinjauannya di buku *Mind, Self and Society*, Mead berpendapat bahwa bukan pikiran yang pertama kali muncul, melainkan masyarakatlah yang terlebih dulu muncul dan baru diikuti pemikiran yang muncul pada dalam diri masyarakat tersebut. Dan analisa George Herbert Mead ini mencerminkan fakta bahwa masyarakat atau kehidupan sosial menempati prioritas dalam analisisnya, Mead selalu memberi prioritas pada dunia sosial dalam memahami pengalaman sosial karena keseluruhan kehidupan sosial mendahului pikiran individu secara logis maupun temporer. Individu yang berpikir dan sadar diri tidak mungkin ada sebelum kelompok sosial. Kelompok sosial hadir lebih dulu dan kemudian mengarah pada perkembangan kondisi mental sadar diri. (Morisson, 2013). Jadi, pada dasarnya Teori Interaksionisme Simbolik adalah sebuah teori yang intinya bahwa manusia bertindak berdasarkan atas makna-makna, dimana makna tersebut didapatkan dari interaksi dengan orang lain, serta makna-makna itu terus berkembang dan disempurnakan pada saat interaksi itu berlangsung.

Pembentukan identitas atas peran perempuan di dalam organisasi PKK pada dasarnya tidak terlepas dari proses komunikasi yang terjadi di PKK. Adanya konstruksi identitas di dalam PKK lebih lanjut berkenaan dengan bagaimana proses produksi dan penerimaan pesan berlangsung di dalam organisasi atau gerakan PKK, terkait sejauh mana para pengurus dan anggota PKK mampu berkontribusi dalamnya. Selanjutnya bagaimana setiap personal individu saling berinteraksi, berkomunikasi, dan saling mempertukarkan makna dengan perspektif masing-masing. Hal inilah yang selanjutnya mengarah ke dalam bentuk interaksionisme simbolik yang akan menghasilkan cara pandang dan anggapan

yang terbentuk pada masing-masing individu yaitu pengurus inti serta kader PKK dalam melihat dirinya ketika tergabung dalam organisasi PKK.

2.9 Penelitian Terdahulu

Tony Pathony (2019) dalam tulisannya mengenai Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Subang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kantor TP PKK Kabupaten Subang Jalan Dewi Sartika No. 2 Kecamatan Subang Kabupaten Subang dan Lingkungan Kecamatan Subang. Proses Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dimana dijelaskan bahwa untuk mengoptimalkan proses pemberdayaan masyarakat diperlukan pengetahuan yang terbaru dan terlengkap sehingga bisa mengajak masyarakat untuk berubah ke arah yang lebih baik, bisa merubah pola pikir masyarakat dan bisa merubah kebiasaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat masyarakat yaitu sebagai berikut: “Para kader kadang-kadang tidak menyampaikan apa-apa kepada warga, padahal kita membutuhkan banyak informasi yang terbaru tentang segala hal. Karena pengaruh Kader dalam mensosialisasikan kepada masyarakat sangat penting. Kita suka mendapat tambahan informasi dari kader seperti tentang penyakit yang baru, penyebab terjangkitnya dan cara pencegahannya. Walaupun suka kurang lengkap juga sih infonya. Karena kalo membaca buku langsung kita suka ngantuk sedangkan untuk browsing ke internet kita tidak mengerti bagaimana cara membukanya”.

Devi Yulianti, Andi Windah, Mediya Destalia (2019) dalam penelitiannya yaitu tentang Peningkatan Kapasitas Dan Pemberdayaan Kelompok Perempuan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) Melalui Penciptaan Usaha Strategis Berbasis Potensi Daerah (Studi Pada Kelompok Perempuan PKK Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran). Menjelaskan bahwa kegiatan “Peningkatan Kapasitas Dan Pemberdayaan Perempuan Kelompok PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) Melalui Penciptaan Usaha Strategis Berbasis Potensi Daerah (Studi Pada Kelompok Perempuan PKK Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran)” yang telah dilakukan, telah membawa peningkatan kemampuan dasar peserta. Peningkatan terendah sebesar 5% dan peningkatan tertinggi sebesar 40%. Rata-rata peningkatan adalah sebesar 17,5%. Peserta yang nilai dasarnya (pre test) cukup tinggi (sekitar 3 peserta) dengan kisaran nilai mulai dari 60-70, ternyata hasil post testnya pun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Setelah diurai oleh tim pengabdian, didapati bahwa hasil Pre-test peserta dengan hasil post test peserta yang terkategori tinggi memiliki korelasi dengan tingkat pendidikan dan pengalaman kerja. Oleh karena itu melalui kegiatan ini, peserta telah mendapatkan pemahaman yang utuh tentang penciptaan usaha strategis berbasis potensi daerah”.

Mei Indrawati (2020) dalam penelitiannya yang berjudul Pemberdayaan Ibu-Ibu PKK Melalui Usaha Rumah Tangga pada Masa Pandemi Covid-19 Menjelaskan bahwa Terlaksananya kegiatan Belanja Antar Tetangga diawali dari adanya fasilitas yang diberikan oleh tim PKK yang pada saat arisan PKK membolehkan anggotanya untuk menjual barang ke ibu-ibu PKK yang lain dengan kewajiban

membayar sebesar lima ribu rupiah untuk dimasukkan ke dalam kas PKK. Namun kegiatan tersebut sifatnya adalah insidental saja, artinya tidak setiap pertemuan PKK ada anggota PKK yang menjual barang. Adanya pandemi yang sangat berdampak pada ekonomi rumah tangga dan kekhawatiran dari para ibu untuk keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan barang rumah tangga sehari-hari menjadi alasan tercetusnya gagasan dibentuknya kegiatan Belanja Antar Tetangga. Ditunjang dengan adanya sosial media berupa WhatsApp yang sangat mempermudah kegiatan Belanja Antar Tetangga ini. Siapa saja diperbolehkan menawarkan produknya di grup WhatsApp tersebut. Secara umum barang-barang yang ditawarkan merupakan kebutuhan dapur dan makanan dengan harga yang sangat terjangkau untuk kondisi saat pandemi ini. Barang yang diperdagangkan tersebut, ada yang memang barang dagangan mereka sendiri, namun ada kalanya para ibu hanya menjadi perantara dari barang dagangan milik orang lain.

Muhammad Anshar (2020) dalam penelitiannya mengenai Penerapan Program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Muslim Di Kelurahan Perintis Medan. Menjelaskan bahwa program PKK merupakan program yang menyangkut pada pelatihan dalam bentuk pendidikan berbasis berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat. Dengan adanya program yang dilaksanakan PKK dapat menimbulkan dampak yang positif terhadap kemajuan ekonomi masyarakat di Kelurahan Perintis Kecamatan Medan Timur.

Ludovikus Bomans Wadu, Iskandar Ladamay, Maria Yosefina Dadi (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Faktor Pendukung dan Penghambat Pembinaan

Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Meningkatkan Keterampilan Warga Negara Melalui Program Pokok PKK. Menjelaskan bahwa faktor pendukung kegiatan untuk meningkatkan keterampilan warga negara khususnya wanita adalah ketersediaan fasilitas kegiatan, fasilitas kegiatan ini diperoleh melalui alokasi dana dari ADD. Sedangkan faktor penghambat TP. PKK dalam meningkatkan keterampilan warga negara khususnya wanita adalah kehadiran dari masyarakat itu sendiri.

Muhammad Rapii, Wahdatussopia (2020) dalam penelitiannya yang berjudul Pemberdayaan Perempuan Dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa dampak dari program PKK terhadap rumah tangga peserta program PKK secara kualitatif berdampak kepada kehidupan yang semakin baik. Hal ini karena sebanyak 90 rumah tangga peserta program PKK dari sebelumnya tidak punya usaha kini mereka punya usaha. Pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program PKK telah memberikan manfaat yang positif terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan Aikmel yang menjadi lokasi penelitian ini. Hal tersebut didukung kegiatan non fisik berupa kegiatan ekonomi produktif yang utamanya dijalankan oleh kaum perempuan. Kesemuanya itu memberikan kesempatan dan keberdayaan bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, untuk secara berangsur angsur melepaskan diri dari belenggu kemiskinan, dengan prakarsa sendiri. Implementasi program PKK di lokasi penelitian dapat menjadi cermin bahwa kebijakan tersebut secara konseptual sangat sesuai dengan harapan maupun aspirasi dari masyarakat

miskin. Oleh karena itu mereka memberikan dukungan yang besar terhadap implementasi program.

Josephine Ondja, Olivia Hadiwirawan (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Kesejahteraan Psikologis Perempuan Anggota PKK. Dari hasil yang telah dilakukan peneliti menunjukkan bahwa para anggota PKK tersebut memiliki tingkat kepuasan hidup dan kebahagiaan yang tinggi. Penelitian ini menemukan bahwa kesejahteraan psikologis perempuan anggota PKK di kelurahan TDU tergolong tinggi. Kesejahteraan psikologis dinilai dari enam dimensi yaitu *autonomy*, *self-acceptance*, *environmental mastery*, *positive relations with other*, *purpose in life*, dan *personal growth*. Individu dengan kesejahteraan psikologis yang tinggi berarti individu mampu menolak tekanan sosial untuk berpikir dan berperilaku dalam cara tertentu, mengevaluasi dirinya sendiri dengan standar pribadi, mampu mengakui dan menerima berbagai aspek dari dirinya, termasuk sifat yang baik maupun yang buruk, mampu memilih atau mengelola lingkungan sehingga sesuai dengan kebutuhan pribadi dan nilai individu, memiliki tujuan dalam hidup, memiliki hubungan yang dekat, memuaskan, dan saling percaya dengan orang lain, peduli mengenai kesejahteraan orang lain, dan terbuka terhadap pengalaman baru.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang sudah peneliti sajikan di atas, fungsi dari penelitian terdahulu bagi penelitian yang sedang dilakukan yaitu berfungsi untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru bagi penelitian selanjutnya, di samping itu juga penelitian terdahulu membantu

penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian.

Apabila dilihat berdasarkan dengan fokus penelitiannya terdapat keterkaitan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yang mana fokus pada pemberdayaan perempuan melalui organisasi PKK. Oleh sebab itu penelitian terdahulu yang telah dipaparkan sebelumnya dapat menjadi referensi penelitian dalam melakukan penelitian ini. Penelitian yang akan dilakukan ini menunjukkan perbandingan yang substantif dengan penelitian sebelumnya, perbandingan tersebut dapat dilihat dari lokasi penelitian, metode penelitian, dan rumusan masalah yang dimana hasil akhirnya berbeda dengan penelitian sebelumnya. Serta terdapat perbedaan kajian dari penelitian sebelumnya, sebab dalam penelitian ini penulis hendak mengkaji mengenai perempuan dalam organisasi PKK, bagaimana perempuan memandang dirinya dan dunianya dalam organisasi PKK.

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode etnografi. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memiliki prosedur dengan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan dari perilaku yang diamati (Moelong, 2010). Sedangkan menurut Michael Burawoy metode etnografi merupakan metode yang digunakan untuk “mempelajari orang di ruang dan waktu mereka sendiri, dalam kehidupan sehari-hari mereka sendiri” (Hallett and Barber, 2014:307; Burawoy et al 1991:2). Senada dengan pendapat Shagrir (2017) etnografi merupakan pendekatan penelitian yang mengacu pada proses dan metode menurut penelitian yang dilakukan dan hasilnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa metode etnografi merupakan studi kualitatif terhadap diri individu atau sekelompok dengan tujuan mendeskripsikan karakteristik kultural lebih mendalam secara sistematis dalam ruang dan waktu mereka sendiri. Dengan menggunakan metode ini peneliti mendapatkan informasi secara menyeluruh dan mendalam mengenai penelitian yang mengangkat tentang bagaimana perempuan memandang dirinya ketika berada di organisasi.

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta alasan ketertarikan seorang perempuan bergabung di organisasi PKK.

3.2 Penentuan Informan

Informan dalam penelitian ini yaitu selaku pengurus PKK dan kader PKK yang telah aktif dalam organisasi PKK Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini yaitu di Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Dipilihnya Desa Hanura sebagai lokasi penelitian yaitu karena organisasi PKK di desa tersebut terkenal aktif dan desanya juga sangat maju, selain itu alasan dipilihnya desa tersebut menjadi lokasi penelitian yaitu karena Desa Hanura merupakan desa yang mandiri, dimana desa mandiri merupakan desa yang sudah dapat memenuhi kebutuhan desa secara mandiri dan tidak semata-mata bergantung dengan bantuan pemerintah.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam memperoleh data, yaitu:

3.4.1 Observasi

Menurut Adler, dalam Hasyim (2016) menjelaskan bahwa observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya dalam membahas ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia. Objek dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang tergabung dalam organisasi PKK serta para pengurus PKK. Jadi, dalam penelitian ini peneliti akan terlibat secara langsung dengan masyarakat yang berada dalam organisasi PKK.

3.4.2 Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dilakukan secara tatap muka antara pewawancara dengan informan guna mendapatkan informasi yang diinginkan agar sesuai dengan tujuan penelitian (Bungin, 2007). Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan ketua PKK, pengurus tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan kader PKK.

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mendapat data yang berbentuk tulisan atau catatan dan digunakan untuk memperkuat data yang

telah di peroleh baik sebelum, pada saat ataupun setelah penelitian dilakukan. Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah atau variabel yang digunakan dalam penelitian ini baik secara tertulis maupun lisan. Dokumen yang dikumpulkan penulis antara lain data berupa buku atau catatan berkaitan dengan pemberdayaan wanita, PKK, dan lain-lain.

3.5 Jenis dan Sumber Data

3.5.1 Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer didapatkan dengan cara wawancara mendalam terhadap informan, selain itu juga terdapat catatan observasi lapangan yang dapat mendukung serta relevan dengan permasalahan yang diteliti. Informan dalam penelitian ini yaitu selaku perempuan yang tergabung dalam organisasi PKK.

3.5.2 Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan melalui studi pustaka, dokumentasi, ataupun dari laporan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, catatan, arsip, serta dokumen lain yang dapat digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer.

3.6 Teknik Analisis Data

Afrizal (2014) memberikan pengertian analisis data pada penelitian kualitatif sebagai sebuah proses sistematis dalam menentukan setiap bagian yang memiliki keterkaitan secara keseluruhan dengan informasi yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan kategori atau pemaknaan. Dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif, yang memberi gambaran, penjelasan, serta penafsiran hasil dari penelitian menggunakan susunan kalimat sebagai jawaban untuk masalah atau topik yang sedang diteliti. Tahapan pengolahan data hasil penelitian menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

3.6.1 Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2012) mereduksi data memiliki pengertian membuat rangkuman, memetakan hal yang bersifat pokok, fokus terhadap hal-hal yang sifatnya penting, serta mencari pola atau temanya, sehingga data yang telah direduksi dapat mempermudah memberi gambaran peneliti untuk melakukan proses pengumpulan data selanjutnya.

3.6.2 Penyajian Data

Miles dan Huberman (dalam Sheila, 2013) mengemukakan bahwa penyajian data merupakan penyajian kumpulan informasi yang memberi kemungkinan terjadinya penarikan sebuah simpulan serta pengambilan tindakan. Penyajian data tersebut biasanya berbentuk grafik, matrik, bagan, dan jaringan. Kesemuanya dirancang untuk kemudian informasi tersebut digabungkan dan disusun dalam sebuah bentuk padu dan mudah dijelaskan.

3.6.3 Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan

Menurut Sugiyono (2012) langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan. Dapat dikatakan kesimpulan apabila rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dapat terjawab, tapi terdapat kemungkinan juga tidak, hal tersebut dikarenakan masalah dan rumusan masalah bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang konsisten dan valid saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan dapat dikatakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Desa Hanura

4.1.1 Sejarah Desa Trans-AD II Hanura

Desa Hanura (Trans-AD II Hanura) berada di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Desa Hanura adalah salah satu program transmigrasi yang dilaksanakan oleh Angkatan Darat (TNI-AD). Program Transmigrasi Angkatan Darat (Trans-AD) merupakan sebuah gagasan dari Jenderal Ahmad Yani, Menteri Panglima Angkatan Darat pada saat itu. Gagasan transmigrasi sebagai bentuk mewujudkan pondasi prajurit TNI Angkatan Darat (TNI-AD) dalam memasuki dunia politik, dengan membangun citra positif di tengah masyarakat menggunakan asas demokrasi dari, oleh, dan untuk rakyat, selanjutnya dikemas dalam perwujudan pola Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (HANKAMRATA). Gagasan tersebut bertujuan untuk anggota TNI-AD dan memberi peluang kesejahteraan bagi anggota TNI-AD beserta keluarganya setelah memasuki Usia Bebas Tugas (UBT) dan pensiun. Sebagai bentuk upaya peremajaan di lingkungan TNI-AD dengan memindahkan anggota yang telah habis masa tinggalnya dalam asrama ataupun berganti pangkat untuk kemudian berganti dengan anggota lain

yang memiliki hak untuk asrama. Melalui kemampuan daya dan dana yang dimiliki TNI Angkatan Darat, lahirlah Program Transmigrasi Angkatan Darat (Trans-AD). Diketahui bahwa program transmigrasi merupakan bentuk kegiatan perpindahan penduduk yang dalam melaksanakannya tidak terlepas dari pengaruh faktor-faktor pendorong (*Push Factor*) dan faktor penariknya (*Pull Factor*). Keputusan untuk melakukan migrasi tidak terlepas dari tanggapan lembaga atau masyarakat. Faktor tersebut berkaitan dengan berbagai kondisi sosial, ekonomi serta kondisi politik yang terjadi pada saat itu di Indonesia.

Transmigrasi Angkatan Darat II (Trans-AD II) Hanura merupakan Program Transmigrasi Angkatan Darat yang ke-dua dilaksanakan di Provinsi Lampung setelah Transmigrasi Angkatan Darat pertama pada tahun 1964 di daerah Poncowati, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Program ini dibuka secara resmi pada tanggal 17 September 1966 oleh Mayor Jenderal Alamsyah Ratu Prawira Negara selaku Assisten VII KASAD mewakili Pimpinan Angkatan Darat. Selanjutnya program ini diberi nama Hanura yang merupakan kepanjangan dari “Hati Nurani Rakyat”.

Proyek Trans-AD II Hanura dibuka pada tanggal 17 September 1966, dengan meberangkatkan keluarga transmigran yang selanjutnya dituntaskan pada bulan April 1967. Lokasi Proyek berada di titik antara Km 12 dan Km 14 Jalan Raya Teluk Betung–Padang Cermin dengan luas lahan 600 Ha. Sebanyak 157 kepala keluarga Anggota Trans-AD II

Hanura yang berasal dari enam Kodam berbeda yang terdiri atas Departemen Pertahanan Pusat 4 kepala keluarga, Kodam Sriwijaya 12 kepala keluarga, Kodam Siliwangi 14 kepala keluarga, Kodam Diponegoro 86 kepala keluarga, Kodam Brawijaya 32 kepala keluarga, dan Veteran 9 kepala keluarga. Pada tanggal 27 Desember 1978 seluruh Proyek Transmigrasi Angkatan Darat di Provinsi Lampung (6 Proyek Transmigrasi) yaitu, Poncowati, Hanura, Purnama Tunggal, Bandar Agung, Bandar Sakti, dan Tanjung Anom diserahkan pengelolaanya kepada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

Proyek Trans-AD II Hanura kemudian diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dibawah pembinaan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, dengan status Desa Swadaya. Semenjak diberlakukannya pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Suksesi kepemimpinan desa segera dipersiapkan sesuai dengan UU yang berlaku, mengacu pada Undang-Undang No.5 tahun 1979, sebagai Kepala Pemerintahan Desa Pertama ditunjuklah Mayor Mariyo dengan mempertimbangkan umur dan pangkat yang tertinggi kala itu dan sebagai sekretaris desa ditunjuk Soepriyanto. Sebagai Kepala Dusun diperintahkan kepada salah satu anggota yang memiliki pangkat tertinggi di tiap dusun. Nama-nama Kepala Dusun Desa Trans-AD II Hanura antara Lain, Dusun A dipimpin oleh Mayor Marijo, Dusun B oleh Katrیمان, Dusun C oleh Sarwan, dan Dusun D oleh Peltu ST. Sulaiman.

Melihat usianya senjanya serta kemampuan yang semakin menurun, pada tahun 1967 Mayor Mariyo melepaskan jabatannya sebagai kepala Desa Hanura dan digantikan oleh Kapten William Corne sampai dengan tahun 1969, pada tahun yang sama mulai dilaksanakan proses demokrasi dalam suksesi Kepemimpinan di Desa, pemilihan Kepala Desa Trans-AD II Hanura dilaksanakan, Kopralsatu Tugio terpilih Sebagai Kepala Desa, namun dalam perjalanannya memimpin Desa Hanura, pada bulan November tahun 1971, Kopralsatu Tugio meninggal dunia. Kepemimpinan Desa diteruskan oleh Bapak Pembantu Letnan Satu Sankardi sampai tahun 1972. Untuk mengisi kepemimpinan pada Periode 1972–1977 Desa Trans-AD II Hanura kembali melaksanakan pemilihan Kepala Desa baru, dan terpilihlah Sersan Mayor Sularno.

Pemilihan Kepala Desa yang ketiga kalinya dilaksanakan untuk masa jabatan pada Periode 1977–1982, terpilih Pembantu Letnan Satu Enan Setiyadi untuk menjabat Kepala Desa Trans-AD II Hanura. Namun ditengah perjalanan kepemimpinannya, Pembantu Letnan Satu Enan Setiyadi meninggal dunia pada bulan September 1978, dan Pemerintahan Desa diteruskan oleh Sersan Mayor Supardi sebagai Pejabat Kepala Desa Trans-AD II Hanura sampai tahun 1980.

Pada tanggal 27 Desember 1978 berdasarkan Surat Perintah Panglima Komando Daerah Militer II Sriwijaya Nomor: SPRIN/2549/XII/1978, seluruh Proyek Transmigrasi Angkatan Darat di Provinsi Lampung (6 Proyek Transmigrasi) yaitu, Poncowati, Hanura, Purnama Tungal,

Bandar Agung, Bandar Sakti, dan Tanjung Anom diserahkan pengelolaanya kepada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Serah terima Proyek Transmigrasi dilakukan secara seremonial pada tanggal 14 Februari 1979 di Desa Poncowati yang merupakan Proyek Trans-AD I. Di bawah kepemimpinan Pembantu Letnan Dua Misban Gunung dari tahun 1980–1990 Desa Trans-AD II Hanura kemudian diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dibawah pembinaan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, dengan status Desa Swadaya. Semenjak diberlakukannya pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, maka penyelenggaraan Pemerintah Desa mengacu pada Undang-Undang No. 5 tahun 1979, oleh karena itu suksesti kepemimpinan desa segera dipersiapkan sesuai dengan UU yang berlaku, selanjutnya dilakukan pemilihan kepala desa.

Pada tahun 1980-1988 Bapak Misban Gunung memangu jabatan Kepala Desa Hanura, Bapak Misban Gunung masih menjabat hingga tahun 1990. Persiapan pemilihan selanjutnya maka ditunjuklah Bapak Sukarsono yang saat itu menjabat sekretaris desa dijadikan sebagai Pejabat Kepala Desa Hanura hingga Tahun 1993. Karena Pemilihan belum berhasil maka ditugaskan Bapak Badril Amiril (Pegawai Kecamatan Padang cermin) sebagai pelaksanaan Harian Kepala Desa Hanura Serta menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa Hanura. Pemilihan Kepala Desa Tahun 1995, terpilih Bapak Soeroto sebagai Keapla Desa Hanura Periode 1995 – 2003. Sambil menunggu pemilihan berikutnya, Bapak Soeroto menjabat hingga tahun 2005. Pada bulan Maret 2005 diselenggarakan Pemilhan

Kepala Desa dan terpilihlah Bapak Samino sebagai kepala Desa Hanura hingga Tahun 2010. Persiapan pemilihan Kepala Desa selanjutnya yaitu Bapak Sukarsono ditunjuk menjadi Pejabat Kepala Desa Hanura hingga bulan Oktober Tahun 2012.

Bapak Chodri Cahyadi Terpilih menjadi Kepala Desa Hanura pada tahun 2012 sampai dengan 2018. Dari kepemimpinannya, terjadi perubahan yang sangat signifikan yaitu dengan lahirnya undang-undang Desa tahun 2014, digitalisasi desa mulai diterapkan, sehingga Tahun 2016 Desa Hanura terpilih menjadi juara Nasional Lomba Desa dan Meraih penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik di tahun 2018. Pada Tahun 2018 sampai Tahun 2019, Bapak Slamet Widodo ditunjuk oleh Bupati Pesawaran Dendi Romadhona sebagai Pejabat Kepala Desa Hanura. Pada tahun 2019 terpilihlah Bapak Rio Remota sebagai Kepala Desa Hanura hingga saat ini.

4.1.2 Struktur dan Organisasi Desa Hanura

Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di perdesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur pemerintahan Desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa,

yang meliputi Sekretaris Desa dan lainnya. Struktur organisasinya adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3). Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, dan pemberdayaan desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1)

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4 tentang UU Desa). Fungsi BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 55) adalah:

- a. Membahas dan menyepakati Rencana Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

3. Sekertaris

Sekertaris merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Fungsi sekretaris desa adalah:

- a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa.
- b. Membantu dalam persiapan penyusunan Peraturan Desa.
- c. Mempersiapkan bahan untuk Laporan Penyelenggara Pemerintah Desa.
- d. Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin.
- e. Pelaksana tugas lain yang diberikan kepada kepala desa.

4. Kepala Urusan (Kaur)

Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Kepala Urusan terdiri dari beberapa bidang yaitu terdiri dari:

- a. Kepala Urusan Pemerintah
- b. Kepala Urusan Pembangunan
- c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat
- d. Kepala Urusan Keuangan
- e. Kepala Urusan Umum

5. Pelaksana Kewilayahan

Kepala Dusun (KADUS) tugas kepala dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Fungsi kepala dusun:

- a. Membantu pelaksana tugas kepala desa di wilayah kerja yang sudah ditentukan.

- b. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- c. Melaksanakan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa.
- d. Membantu kepala desa melakukan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga.
- e. Membina swadaya dan gotong royong masyarakat.
- f. Melakukan penyuluhan program pemerintah desa.
- g. Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Berikut Tabel Daftar Nama Perangkat Dan Staf Kantor Desa Hanura

Tabel 1. Struktur Pemerintahan Desa Hanura

No	Nama	Jabatan
1	RIO REMOTA, S.P.	Kepala Desa
2	YUDI APRIYANTO	Sekretaris Desa
3	SUSILAWATI	KASI KESRA
4	WIMBO SUKMONO	KASI Pemerintahan
5	ABUR RAHMAN	KASI Pelayanan
6	AHMAD SUBARCAH	Kaur Perencanaan
7	SATRIANI	Kaur Keuangan
8	SHINTA MARTASARI	Kaur Adm dan Umum
9	TRI AGUNG BIANTORO	Operator Desa Hanura
10	THOSAN HARVENDY	Kepala Dusun A
11	APRIANSYAH	Kepala Dusun B
12	BAYU SULISTIYO	Kepala Dusun C
13	SULISTIONO	Kepala Dusun D
14	JUNAEDI	Emergency Unit (Ambulan)
15	PANDRIADI	Upt Pasar Ampera
16	SUGENG RAWUH	Upt Pasar Ampera
17	ALAMSYAH	Upt Pasar Ampera
18	UJANG SUHERDI	Staf Kebersihan
19	PRAMONO	Staf Kebersihan

Sumber: Data Hasil Penelitian, 2021

4.2 Kondisi Geografis Desa Hanura

4.2.1 Batas-batas Desa

Desa Hanura Terletak Pada Ketinggian rata-rata 10 M Dari Permukaan Laut (DPL), dengan batas-batas desa sebagai berikut:

Sebelah Utaara : Desa Hurun Kecamatan Teluk Pandan

Sebelah Timur : Pesisir Laut Teluk Pandan

Sebelah Selatan : Desa Sisodadi Kecamatan Teluk Pandan

Sebelah Barat : Desa Cilimus Kecamatan Teluk Pandan

4.2.2 Orbitasi

1. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan 1 km
2. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten 45 km
3. Jarak ke Ibu Kota Provinsi 13 km
4. Jarak ke Pemerintah Pusat 14 km

4.2.3 Topografi

Sebagian besar Desa Hanura adalah berupa Dataran, sebagian lainnya bergelombang dan bukit dengan keseluruhan luas wilayah mencapai 3311 Ha. Terdiri terdiri dari 4 Dusun, yaitu Dusun A, B, C, dan Dusun D serta Rukun Tetangga (RT) yang berjumlah 34.

4.2.4 Luas Wilayah Desa Hanura Menurut Fungsinya

Tabel 2. Luas Wilayah Desa Hanura

No	Peruntukkan Lahan	Luas Lahan (Ha)
1.	Sawah	25 Ha
2.	Tanah Bukan Sawah	575 Ha
3.	Pekarangan	200 Ha
4.	Perkebunan	265 Ha
5.	Hutan Desa	35 Ha
6.	Tambak	50 Ha
7.	Kolam	15 Ha
8.	Tanah Desa	10 Ha
Total		1.175 Ha

Sumber: Data Monografi Desa, 2021

4.2.5 Peta Persebaran Penduduk Desa Hanura

Gambar 1. Peta Persebaran Penduduk Desa Hanura



Sumber : Data Monografi Desa 2021

4.3 Keadaan Penduduk Desa Hanura

4.3.1 Jumlah Penduduk

Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Hanura

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	3.555 Jiwa
2	Perempuan	3.813 Jiwa
Total		7.368 Jiwa

Sumber : Data Monografi Desa 2021

Berdasarkan tabel 3, Jumlah penduduk Desa Hanura yaitu berjumlah 7.386 jiwa. Terdiri dari 3.555 jiwa penduduk dengan jenis kelamin laki-laki, dan 3.813 jiwa penduduk dengan jenis kelamin perempuan. Serta memiliki jumlah total 1.736 kepala keluarga. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa penduduk di Desa Hanura cukup padat dengan jenis kelamin terbanyaknya yaitu perempuan. Oleh karena itu hal ini akan mendukung semakin baiknya keberadaan PKK, sebab PKK banyak di dominasi oleh perempuan, sehingga ketika para kader PKK berhasil melaksanakan pemberdayaan terhadap perempuan di desa Hanura maka sama saja dengan menyejahterakan keluarga.

4.3.2 Status Sosial Ekonomi Masyarakat

Tabel 4. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Hanura

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	163
2	Buruh	91
3	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	87
4	Pedagang	27
5	Peternak	5
6	Nelayan	5
7	Perawat	2
8	TNI	54
9	POLRI	3
10	Guru	13
11	Dosen	1
12	Wiraswasta	265

Sumber : Data Monografi Desa 2021

Berdasarkan tabel 4, pada saat ini sebagian besar masyarakat Desa Hanura bekerja sebagai wiraswasta dengan jumlah 265 jiwa. Banyaknya yang bekerja sebagai wiraswasta dilatarbelakangi oleh kondisi status Desa yang mandiri. Dalam hal ini berpengaruh pada pola pikir masyarakat, dimana mereka lebih memilih bekerja sebagai wiraswasta yaitu dengan tujuan ingin memiliki keleluasaan dalam bekerja serta berpotensi memiliki penghasilan yang besar. Pada tabel diatas juga tertera jumlah masyarakat yang bekerja sebagai TNI dikategorikan cukup banyak, hal ini dilatarbelakangi oleh sejarah Desa, yaitu Desa Hanura merupakan Desa yang dibangun atas proyek Pemerintah yaitu proyek Trans-AD II.

4.3.3. Penduduk Berdasarkan Kepercayaan

Tabel 5. Agama Penduduk Desa Hanura

No	Agama	Jumlah
1	Islam	3.635
2	Kristen	1.841
3	Katholik	1.343
4	Hindu	492
5	Budha	57
Total		7.368

Sumber : Data Monografi Desa 2021

Tabel 6. Tempat Ibadah

No	Jenis	Jumlah
1	Masjid	3 Unit
2	Gereja	3 Unit
3	Mushala	17 Unit
4	Rumah Doa	2 Unit

Sumber : Data Monografi Desa 2021

Berdasarkan tabel 5 dan 6 terlihat jelas bahwa ada 5 agama yang dianut oleh penduduk Desa Hanura, yang artinya bahwa kondisi masyarakat berdasarkan kepercayaan atau agama bersifat heterogen. Agama terbanyak yang dianut oleh penduduk Desa Hanura yaitu agama Islam dengan jumlah 3.635 jiwa. Sejauh ini, meskipun terdapat berbagai macam agama di Desa Hanura, tetapi masyarakat Desa Hanura tetap hidup harmonis dan saling menghargai satu sama lain. Selain itu, sarana dan prasarana tempat ibadah juga tersedia cukup banyak dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat Hanura dalam beribadah menyesuaikan dengan daerah tempat tinggalnya, sehingga tidak ada alasan jarak dalam proses pelaksanaan ibadah.

4.3.4 Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Tabel 7. Tingkat Pendidikan Desa Hanura

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	518
2	SD	2.395
3	SMP	2.332
4	SMA	1.946
5	D-1	68
6	D-2	33
7	S-1	41
8	S-2	19
9	S-3	9
10	SLB A	7
Total		7.368

Sumber : Data Monografi Desa 2021

Tabel 8. Sarana Pendidikan Desa Hanura

No	Nama Pendidikan	Jumlah
1	Paud	5
2	TK	1
3	SD	3
4	SMP	1
5	MA/MTS/MI	3
6	SMA	1

Sumber : Data Monografi Desa 2021

Berdasarkan pada tabel 7 dan 8 dapat diidentifikasi bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Hanura tergolong sedang dan cukup baik, karena mayoritas penduduk Desa Hanura mengenyam pendidikan sampai pada jenjang SMA sebanyak 946 jiwa. Serta yang tidak bersekolah atau tidak tamat SD yaitu 518 jiwa, sehingga hal ini akan menjadi salah satu sebab Desa Hanura menjadi Desa Mandiri karena masyarakatnya rata-rata mengenyam pendidikan yang berpengaruh terhadap wawasan, saran, serta masukan untuk kegiatan Desa sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas daerah serta penduduknya. Dalam hal ini dapat dilihat juga sarana dan prasarana pendidikan dari tingkat Paud sampai

dengan SMA sudah tersedia di Desa Hanura, hal ini bertujuan agar memudahkan masyarakat Desa Hanura dalam bidang pendidikan.

4.3.5 Sarana dan Prasarana Desa Hanura

Tabel 9. Insfrastruktur Desa Hanura

No	Infrastruktur Desa	Jumlah
1	Pasar Tradisional Besar	1 Unit
2	Minimarket	3 Unit
3	Perbankan	2 Unit
4	Balai Kementrian	1 Unit
5	Rumah Makan	6 Unit
6	Pos	1 Unit
7	Kaja PLN	1 Unit
9	Puskesmas	1 Unit
10	Kantor Desa	1 Unit
11	Posyandu	3 Unit
12	Samsat Desa	1 Unit

Sumber: Data Monografi Desa 2021

Berdasarkan tabel 9 yaitu mengenai sarana dan prasarana Desa di Desa Hanura sudah terbilang sangat lengkap, hal ini sesuai dengan status Desa yaitu Desa mandiri, dimana fasilitas tersedia untuk masyarakat dengan cukup baik dan layak. Tentunya hal ini akan semakin mendorong aktivitas masyarakat yang tidak perlu lagi untuk keluar dari Desa Hanura, sebab hampir semuanya sudah terpenuhi melalui Desa sendiri. Dari segi ekonomi, hal ini akan berdampak pada perekonomian masyarakat, dimana akan terjadi perputaran uang yang baik dan akan terjadi peningkatan pada taraf perekonomian masyarakat. Sedangkan jika ditinjau dari segi sosial, hal ini akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

BAB VI. PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tentang Perempuan Dan PKK : Suatu Kajian Etnografi Perempuan Di Organisasi PKK (Di Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Pesawaran) yang telah peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman seorang perempuan tentang konsep dirinya dan dunianya di organisasi PKK yaitu para kader PKK memiliki konsep diri positif yang dibuktikan dengan ketika profesi sebagai “kader” telah melekat dalam dirinya, maka mereka menganggap bahwa dirinya harus bertanggungjawab atas peran tersebut. Para perempuan yang telah menjadi kader PKK, mempunyai anggapan bahwa seorang kader harus memberikan contoh yang baik melalui sebuah sikap dan perilaku bahkan sampai pada segi penampilan yang akan dinilai oleh masyarakat sekitar.
2. Strategi kader PKK dalam mencapai program kerja PKK yaitu melalui diberikan keleluasaan dalam menjalankan program kerja di bidangnya masing-masing, tetapi untuk secara keseluruhan lebih kepada seorang kader memberikan contoh diri yang baik kepada masyarakat. Karena masyarakat membutuhkan bukti nyata, sehingga ketika kader sudah memberikan bukti

3. bahwa, ternyata ikut PKK berdampak positif. Dengan begitu, secara tidak langsung ketika kader PKK mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pemberdayaan mereka enggan untuk menolak, dan sebenarnya ini bukan hanya sekedar program kerja saja tetapi bagaimana keberlanjutan dan kebermanfaatan sebuah pemberdayaan untuk masyarakat dari kader PKK.
4. PKK Desa Hanura tidak memiliki program unggulan yang dijadikan sebagai prioritas dalam melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat. Namun, pada tahun ini pemerintah memang mengeluarkan kebijakan bahwa fokus pemberdayaan terletak pada Pokja 4 yaitu terkait dengan Bidang Kesehatan, Bidang Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat, hal ini termasuk stunting dan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Sehingga, semua program kerja yang telah disusun oleh pengurus dan para kader PKK dilaksanakan secara menyeluruh dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin.
5. Pemberdayaan yang diterapkan di Desa Hanura sudah termasuk berhasil, karena kerjasama antar kader sudah terjalin serta masyarakat menerima dan merespon dengan baik. Tingkat keberhasilannya dapat diukur dengan sosialisasi yang sudah dilaksanakan dengan baik kepada masyarakat, bahkan ketika kita melakukan sosialisasi mereka tidak hanya mendengarkan tetapi ikut melaksanakan sesuai kebutuhan, contohnya pada program KB (Keluarga Berencana). Yaitu Pokja 4 mengenai bidang kesehatan. Ketika kader melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait KB maka masyarakat yang awalnya takut dan tidak mau KB tetapi rasa takut dan rasa tidak mau KB diyakinkan dengan bukti kader yang sudah mengikuti program KB terlebih dahulu sebelum melaksanakan sosialisasi kepada warga, sehingga darisitu

warga yakin bahwa para kader PKK yang sudah terlebih dahulu ikut KB keadaan kader tersebut baik-baik saja dan bahkan terbukti aman.

6.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang kiranya dapat berguna bagi semua pihak yaitu :

1. Dilihat dari pelaksanaan pemberdayaan yang telah dilaksanakan oleh kader PKK di Desa Hanura, lebih rutin lagi mengadakan pertemuan terkait dengan diadakannya pelatihan keterampilan bagi masyarakat, sebab masyarakat sudah memberikan kepercayaan terhadap para kader PKK. Dan terkait masyarakat yang kurang pro terhadap PKK, sebaiknya tetap diajak jika ada kegiatan PKK, sehingga mereka sadar bahwa kegiatan PKK merupakan sebuah kegiatan yang positif.
2. Dilihat dari pelaksanaan program kerja yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana. Agar kedepannya para kader lebih memaksimalkan peran dan usahanya untuk melaksanakan seluruh program kerja yang bisa bekerjasama dengan pemerintah Desa Hanura.
3. Melihat prospek yang cukup bagus dari pokja 2 yaitu mengenai pendidikan dan koperasi. Hubungan kerjasama antara kader PKK dan Pemerintah harus lebih erat kembali, supaya masyarakat pelaku UMKM di Desa Hanura lebih semangat, agar pemasarannya tidak hanya di daerah lokal saja tetapi ke luar daerah. Sehingga para masyarakat yang berkecimpung di UMKM dapat

memiliki usaha yang produktif yang akan berdampak pada kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, dkk. (2018). *Sosiologi Organisasi dan Manajemen*. CV AURA: Bandar Lampung.
- Abdulsyani. (1992). *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. PT Bumi Aksara: Jakarta.
- Abidin, K., & Djabbar, Y. (2019). *Analisis Interaksi Simbolik Waria (Wanita Transgender)*. Makassar-Indonesia Timur.
- Aida Vitalaya S. Hubeis. (2010). *Pemberdayaan Perempuan dari Masa Ke Masa*. IPB Press: Bogor. hlm. 156.
- Alvianta, F. N., Prabowo, A. A., & Komarudin, A. (2021). Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Pemberdayaan Keluarga Prasejahtera. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*. 5(3). Doi:10.36312/jisip.v5i3.2095.
- Anshar, M. (2020). Penerapan Program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Muslim Di Kelurahan Perintis Medan. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 193-205. Doi:10.46576/bn.v3i2.1008.
- Bagong Suyanto & Emy Susanti Hendarso, *Wanita Dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju Ke Pemberdayaan*, (Surabaya : Airlangga University Press, 1996), hlm 154.
- Bunsaman, S. M., & Taftazani, B. M. (2018). Peranan Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga (Studi Tentang Peranan sPetugas K31 Perempuan Universitas Padjadjaran Jatinangor (Zona: Rektorat). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 146. doi:10.24198/jppm.v5i2.18373.
- Dewi, Y. S. (2017). Peran Perempuan Dalam Pembangunan Berkelanjutan *Women In Sustainable Development*. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan Dan Pembangunan*, 12(2), 61–64. doi:10.21009/plpb.122.05.
- Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012) hlm 21-22 30 Ibid, hlm 26.

- Hadi, A. P. (2010). Konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangunan. *Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)*.
- Harahap, Jam'ah. (2019). Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Pemberdayaan Wanita Di Desa Simatahari Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Hearn, J. (2019). *Gender, Work and Organization : A gender–work–organization analysis. Gender, Work & Organization*, 26(1), 31–39. doi:10.1111/gwao.12331
- <https://lampungmediaonline.com/desa-hanura-raih-juara-1-lomba-desa-tingkat-sumatera/>
- Indrawati, M. (2020). Pemberdayaan Ibu-Ibu PKK Melalui Usaha Rumah Tangga pada Masa Pandemi Covid. Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan *Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 3. doi:10.37695/pkmsr.v3i0.805.
- Karim, A. (2014). Kerangka Studi Feminisme (Model Penelitian Kualitatif tentang Perempuan dalam Koridor Sosial Keagamaan). *Fikrah*, 2(1).
- Lewis, P., & Pullen, A. (2018). *Gender, Work and Organization in 2018. Gender, Work & Organization*, 25(2), 107–109. doi:10.1111/gwao.12248
- Lewis, P., Benschop, Y., & Simpson, R. (2017). *Postfeminism, Gender and Organization. Gender, Work & Organization*, 24(3), 213–225. doi:10.1111/gwao.12175
- Lilik Aslichati, Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Sebagai Sarana Pemberdayaan Perempuan, *Jurnal Vol 7 No1*. 2011, hlm. 2.
- Mahmudah, N. (2018). Suami Tkw Yang Mengurus Rumah *Sebuah Studi Sosiologis Tentang Renegosiasi Identitas Laki-Laki Pada Kaum Patriarkah* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2019). *Pemberdayaan masyarakat*. Deepublish.
- Miles, Matthew B dan Huberman A. Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press Plummer, R. 1983. *Life Span Development Psychology: Personality and Socialization*. New York: Academic Press.
- Moleong, J Lexy. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Naharin, N. (2017). Subordinasi Perempuan Dalam Organisasi (Organisasi Mahasiswa Iain Tulungagung Tahun 2015). *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak*, 1(1), 175-196.

- Nyoman, Suartha, Kontribusi Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga,(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.21 5Ibid, hlm. 22.
- Ondja, J., & Hadiwirawan, O. (2018). Kesejahteraan Psikologis Perempuan Anggota PKK. *Journal Psikogenesis*, 6(1), 91–103. doi:10.24854/jps.v6i1.636.
- Pathony, T. (2020). Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Subang. *Ijd-Demos*, 1(2). doi:10.31506/ijd.v1i2.23.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2020. *Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga*. Nomor 36 Tahun 2020. Jakarta.
- Perempuan, K. P., Anak, P., & Statistik, B. P. (2018). Pembangunan manusia berbasis gender. *Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*.
- Probowati, Y. (2020). Pemberdayaan PKK dengan Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Mendukung Program Ketahanan Pangan Keluarga. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 3, 463–469. doi:10.37695/pkmcsr.v3i0.812.
- Rapii, M., & Wahdatussopia, W. (2020). Pemberdayaan Perempuan Dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). *Jambura Economic Education Journal*, 2(2), 80–89. doi:10.37479/jeej.v2i2.5933.
- Risyanti, Riza & Roesmidi, M.M. (2006). *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang : Alqaprint Jatinangor.
- Sayekti, I. (2019). Analisis Teori Interaksionisme Simbolik Pada Pengaplikasian Konsep Maskulinitas Mahasiswa Universitas Sebelas Maret. *Sosialitas; Jurnal Ilmiah Pend. Sos Ant*, 8(1).
- Sejarah Desa Hanura diakses dari <http://hanura.desa.id>, pada tanggal 15 Oktober 2021.
- Sejarah Singkat PKK diakses dari <http://www.tp-pkkpusat.org>, pada tanggal 15 Oktober 2021.
- Siyoto, Sandu. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing: Yogyakarta.
- Sofiani, T. (2013). Membuka ruang partisipasi perempuan dalam pembangunan. *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 1(1).
- Suartha, Nyoman. (2015). *Kontribusi Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus di Kabupaten Bandung)*. Rajawali Pres: Indonesia.

- Taqwim, T. M. (2021). Peran Pemberdayaan Perempuan Di Zaman Sekarang. doi:10.31219/osf.io/k8fe2.
- Tujuan Gerakan PKK diakses dari <http://www.tp-pkkpusat.org>, pada tanggal 15 Oktober 2021.
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Dadi, M. Y. (2018). Faktor Pendukung dan Penghambat Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan Keterampilan Warga Negara Melalui Program Pokok PKK. *Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 8(1), 62– 71. doi:10.21067/jip.v8i1.2244.
- Windiani, W., & Rahmawati, F. N. (2016). Menggunakan Metode Etnografi Dalam Penelitian Sosial. *DIMENSI-Journal of Sociology*, 9(2).
- Yulianti, D. (2019). Peningkatan Kapasitas Dan Pemberdayaan Kelompok Perempuan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) Melalui Penciptaan Usaha Strategis Berbasis Potensi Daerah (Studi Pada Kelompok Perempuan Pkk Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. *Sakai Sambayan Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*), 3(2), 90. Doi:10.23960/Jss.V3i2.110.
- Zaitunah Subhan, Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos, (Yogyakarta: PT LKIS, 2004), hlm 19.